



Prosiding Seminar Nasional Keketuaan Indonesia di ASEAN 2023

Mendefinisikan Relevansi ASEAN dalam Aspek Politik-Keamanan dan Ekonomi

**The Habibie Center (THC) - Komisi Ilmu Sosial Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia
(KIS-AIPI)**

Jakarta | 8 Februari, 25 Juli, 6 Desember 2024

Prosiding Seminar Nasional Keketuaan Indonesia di ASEAN 2023

**Mendefinisikan Relevansi ASEAN dalam
Aspek Politik-Keamanan dan Ekonomi**

Jakarta | 8 Februari, 25 Juli, 6 Desember 2024



Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia
Gd. Perpustakaan Nasional RI Lt. 17–18
Jalan Merdeka Selatan No. 11, Gambir, DKI Jakarta 10110

Prosiding Seminar Nasional Keketuaan Indonesia di ASEAN 2023

**Mendefinisikan Relevansi ASEAN dalam
Aspek Politik-Keamanan dan Ekonomi
Jakarta | 8 Februari, 25 Juli, 6 Desember 2024**

SUSUNAN KEPANITIAAN

Steering Committee :

Prof. Dr. Mayling Oey-Gardiner
Mohamad Hasan Ansori
Prof. Dr. Satryo Soemantri Brodjonegoro
Julia Novrita
Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo
Ghazali H. Moesa

Penanggung Jawab :

Dr. Chairil Abdini Abdin Said, M.Sc

Ketua :

Dr. Chairil Abdini Abdin Said, M.Sc

Panitia Pelaksana:

Idawati HM Yara	Ramdani
Endang Tjempaka Sari	Herawati
Sigit Asmara Santa	Luthfy Ramiz
Indan Lindan	Mabda Haerunnisa Fajrilla Sidiq
M. Husein	Marina Ika Sari
Shita Azalia	Mayka R. Asnawiyah
Pepi Octayani	Dewi Isma Rikya Ihsan
Rahmalia Septanti	Ashabul Kahfi

Reviewer :

Dewi Fortuna Anwar

Editor :

Dewi Fortuna Anwar, Herawati, Mabda Haerunnisa Fajrilla Sidiq,
Marina Ika Sari, Luthfy Ramiz

Desain Cover & Layout :

Muhamar Alwedy

Tahun Terbit :

2025

ISBN: 978-623-89017-2-2

Penerbit: Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia

Gd. Perpustakaan Nasional RI Lt. 17–18
Jalan Merdeka Selatan No. 11, Gambir, DKI Jakarta 10110
www.aipt.or.id

Bekerja sama dengan: **The Habibie Center**

Jl. Kemang Selatan No.98, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12560

© 2025, HAK CIPTA DILINDUNGI OLEH UNDANG-UNDANG

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku
tanpa izin tertulis dari penerbit

Kata Pengantar

The Habibie Center (THC) dan Komisi Ilmu Sosial Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (KIS AIPI) bekerja sama dalam mengadakan rangkaian seminar nasional pada tahun 2023, seiring dengan keketuaan Indonesia di ASEAN pada tahun yang sama. Seminar ini berlandaskan judul besar “Prosiding Seminar Nasional: Keketuaan Indonesia di ASEAN 2023, dengan tema Mendefinisikan Relevansi ASEAN dalam Aspek Politik-Kemanan dan Ekonomi” dan diselenggarakan dalam tiga seri.

Seminar Topik I membahas mengenai ekspektasi dan analisis terhadap kepemimpinan Indonesia sebagai Ketua ASEAN tahun 2023 dengan judul “Kajian Prioritas Kepemimpinan Indonesia di ASEAN dalam Bidang Politik dan Keamanan,” diselenggarakan di Ruang Serbaguna Lantai 4, Perpustakaan Nasional RI. Diskusi ini dipimpin oleh Prof. Dr. Mayling Oey-Gardiner (Ketua, Komisi Ilmu Sosial, Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia) sebagai moderator dan menghadirkan tiga pembicara, yaitu Prof. Dr. Dewi Fortuna Anwar (Ketua Dewan Pengurus, The Habibie Center dan Anggota Komisi Ilmu Sosial, Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia), Yuyun Wahyuningrum, M.A. (Wakil Indonesia untuk Komisi HAM Antar Pemerintah ASEAN (AICHR)), dan Prof. Hikmahanto Juwana (Rektor, Universitas Ahmad Yani). Selain itu, seminar ini dibuka oleh pidato kunci dari Sidharto R. Suryodipuro (Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia) dan sambutan dari Prof. Dr. Satrio Soemantri Brodjonegoro (Ketua, Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia). Terakhir, seminar ditutup oleh Mohammad Hasan Ansori, Ph.D. (Direktur Eksekutif, The Habibie Center).



Topik II mengkaji capaian dan tantangan pada pilar ekonomi dengan mengusung tajuk, “ASEAN sebagai Epicentrum of Growth: Menuju ASEAN yang Inklusif dan Terintegrasi di bawah Ketekunan Indonesia.” Diskusi ini dipimpin oleh Prof. Dewi Fortuna Anwar (Ketua Dewan Pengurus, The Habibie Center dan Anggota Komisi Ilmu Sosial, Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia) sebagai moderator. Kemudian, diskusi ini menghadirkan Ir. Netty Muharni, MURP (Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional dan Sub-Regional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia), Dr. Zamroni Salim (Direktur dari Pusat Penelitian Makro Ekonomi dan Keuangan, Badan Riset dan Inovasi (BRIN)), dan Dr. Fithra Faisal Hastiadi (Direktur Eksekutif, Next Policy) sebagai pembicara. Seminar seri II dibuka oleh kata sambutan dari Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo (Wakil Ketua, Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia) serta ditutup oleh Prof. Dr. Mayling Oey-Gardiner (Ketua Komisi Ilmu Sosial, Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia) dan Mohammad Hasan Ansori, Ph.D. (Direktur Eksekutif, The Habibie Center).

Terakhir, topik III ditujukan untuk menyajikan evaluasi ASEAN Concord IV sebagai tonggak capaian dari ketekunan Indonesia di ASEAN pada tahun 2023. Bertajuk, “ASEAN Concord IV: Meninjau Tonggak Capaian Ketekunan Indonesia di ASEAN”. Diskusi ini dipimpin oleh Prof. Dr. Dewi Fortuna Anwar (Ketua Dewan Pengurus, The Habibie Center dan Anggota Komisi Ilmu Sosial, Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia) sebagai moderator. Kemudian, seminar topik III menghadirkan Marina Ika Sari, M.Si (Han) (Peneliti, The Habibie Center), Prof. Dr. Djisman S. Simandjuntak (Rektor, Universitas Prasetya Mulya), dan Moch. Faisal Karim, Ph.D. (Dosen Senior Hubungan Internasional, Universitas Islam Indonesia Internasional) sebagai pembicara. Diskusi ini dibuka oleh kata sambutan dari Prof. Dr. Mayling Oey-Gardiner (Ketua Komisi Ilmu Sosial, Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia) dan ditutup oleh

Mohammad Hasan Ansori, Ph.D. (Direktur Eksekutif, The Habibie Center). Seluruh seri seminar juga turut ditayangkan secara daring melalui kanal Youtube resmi THC dan AIPI.

THC dan KIS-AIPI mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas partisipasi, kontribusi, dan kerja sama seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan rangkaian seminar ini. Kami mengapresiasi kerja keras dan kerja sama dari para pembicara, moderator, tim panitia pelaksana dari THC dan KIS-AIPI dalam mempersiapkan hingga seminar ini dapat terselenggara dengan baik. THC dan KIS-AIPI pun turut berterima kasih atas partisipasi aktif dari para partisipan yang hadir secara langsung maupun virtual, sehingga dapat menghadirkan diskusi yang mendalam dan aktif selama seminar berlangsung.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	vii
Keketuaan Indonesia di ASEAN: Mendefinisikan Relevansi ASEAN dalam Aspek Politik-Keamanan dan Ekonomi.....	1
I. Kajian Prioritas Kepemimpinan Indonesia di ASEAN dalam Bidang Politik dan Keamanan	5
A. Prioritas Kepemimpinan Indonesia di ASEAN dalam Bidang Politik dan Keamanan Prof. Dr. Dewi Fortuna Anwar	10
B. Evaluasi Perkembangan Konflik dan Implementasi Five-Point Consensus (5 PCs) di Myanmar H.E. Yuyun Wahyuningrum, M.A.	15
C. Perkembangan Negosiasi <i>Code of Conduct</i> di Laut Cina Selatan (LCS) dan Arah Kebijakan dan Peran Indonesia dalam Menyelesaikan Sengketa LCS Prof. Hikmahanto Juwana Ph.D.	18
D. Diskusi	21
II Epicentrum of Growth: Menuju ASEAN yang Inklusif dan Terintegrasi di Bawah Keketuaan Indonesia.....	27
A. Capaian Implementasi AEC Blueprint 2025 dan Visi ASEAN Pasca-2025 Ir. Netty Muharni, MURP	33

B. Kesenjangan Pembangunan Ekonomi di Kawasan ASEAN serta Tantangan Integrasi Timor Leste ke dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN Dr. Zamroni Salim	37
C. <i>The Global Production Network: The Tale of ASEAN</i> Dr. Fithra Faisal Hastiadi	42
D. Prof. Dewi Fortuna Anwar	48
E. Diskusi	50
III ASEAN Concord IV: Meninjau Tonggak Capaian Keketuaan Indonesia di ASEAN	59
A. Tantangan dan Capaian Keketuaan Indonesia di ASEAN tahun 2023 dalam Bidang Politik dan Keamanan Marina Ika Sari, M.Si (Han)	63
B. <i>To be Science-Driven or Not to be: Regional Neo-Colbertism</i> Prof. Dr. Djisman S. Simandjuntak	68
C. Memahami Signifikansi Inisiatif Indonesia dalam Mengarusutamakan dan Mengimplementasikan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific Moch. Faisal Karim, Ph.D.	70
D. Diskusi	74
Epilog.....	87
Profil Penulis.....	91

Keketuaan Indonesia di ASEAN: Mendefinisikan Relevansi ASEAN dalam Aspek Politik–Keamanan dan Ekonomi

Keketuaan Indonesia di ASEAN tahun 2023 mengangkat slogan “*ASEAN Matters: Epicentrum of Growth*” yang merefleksikan peranan penting ASEAN dalam menjaga perdamaian, stabilitas, dan pembangunan di kawasan. Negara anggota ASEAN secara terus-menerus membangun hubungan yang harmonis guna mencegah konflik terbuka antara sesama negara anggota lainnya. Pembangunan di kawasan ASEAN juga merupakan hal yang terus dibina melalui kerjasama intra-kawasan. Jawaban untuk pertanyaan “Bagaimana ASEAN dapat berkontribusi terhadap kawasan?” adalah melalui pembangunan norma. ASEAN membangun berbagai norma yang cukup dihormati oleh negara anggotanya walaupun tidak ada mekanisme mengikat.

Dalam membina hubungan antar anggota, *Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia (TAC)* merupakan *regional code of conduct* yang sangat penting dan bahkan menjadi instrumen utama bagi negara-negara luar yang kemudian memiliki hubungan dengan ASEAN. Selain itu, melalui Deklarasi *Zone of Peace, Freedom and Neutrality (ZOPFAN)*, dinyatakan bahwa Asia Tenggara adalah wilayah mandiri, damai, dan tidak terlibat dan melibatkan diri dalam konflik. ASEAN juga berkontribusi terhadap stabilitas dan pembangunan di kawasan dengan memainkan peran utama mengelola hubungan dengan negara-negara besar melalui konsepsi *ASEAN Centrality*. ASEAN menjadi penghimpun utama dari berbagai macam-macam entitas dalam wilayah Indo-Pasifik.



Indonesia sebagai negara terbesar di ASEAN menjadikan eksistensinya sangat penting di kawasan. Ketekuaan Indonesia di ASEAN banyak menemui rintangan pada isu-isu kawasan, dimana peran Indonesia pada berbagai aspek politik-keamanan serta sosio-ekonomi ASEAN. Berakhirnya ketekuaan ASEAN pada tahun sebelumnya tidak semata-mata menyelesaikan permasalahan di kawasan. Pada aspek politik-keamanan, Indonesia dihadapkan pada krisis HAM di Myanmar dan sengketa Laut Cina Selatan. Indonesia dihadapkan pada ekspektasi kawasan untuk menorehkan keberhasilan pada proses negosiasi *Code of Conduct (CoC) on the South China Sea* yang telah tertunda selama dua dekade dari awal inisiasinya. Sementara itu, Indonesia juga dihadapkan pada harapan agar dapat mengimbangi, bahkan melebihi, upaya Kamboja yang begitu giat dalam mendorong peran ASEAN dalam penyelesaian krisis di Myanmar selama memegang ketekuaan ASEAN pada tahun 2022.

Pada aspek sosio-ekonomi, pilar “*Epicentrum of Growth*” mencerminkan komitmen Indonesia dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui diplomasi yang berfokus pada pencapaian tujuan-tujuan ekonomi. Fokus Indonesia pada isu ekonomi menjadi strategi ASEAN dalam menghadapi tantangan global yang dapat menimbulkan disrupsi ekonomi di tingkat nasional dan regional. Selain itu, ASEAN juga terus mendorong integrasi ekonomi kawasan dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, termasuk dalam mengatasi ketimpangan di kawasan. ASEAN harus mampu mengatasi ketimpangan ini untuk memastikan bahwa upaya integrasi ekonomi dapat benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat ASEAN.

Sebagai bentuk kontribusi nyata dalam mendukung Ketekuaan Indonesia di ASEAN dan usaha memajukan ASEAN, The Habibie Center bekerja sama dengan Komisi Ilmu Sosial-Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia mengadakan tiga seri seminar nasional

yang bertujuan untuk mengkaji ketekunan Indonesia di ASEAN dengan mempertemukan praktisi dan akademisi untuk memberikan masukan dari berbagai perspektif. Seminar ini diselenggarakan di Perpustakaan Nasional RI.

I

Kajian Prioritas Kepemimpinan Indonesia di ASEAN dalam Bidang Politik dan Keamanan

Indonesia memiliki peran yang signifikan dalam menentukan dinamika dan perkembangan regionalisme di Asia Tenggara, terutama sebagai salah satu pendiri dan anggota ASEAN. Pandangan bahwa Indonesia merupakan “pemimpin natural” dari ASEAN telah diinternalisasikan oleh pemangku kebijakan luar negeri di Indonesia.¹ Dengan demikian, ASEAN memiliki posisi yang krusial dalam kebijakan luar negeri Indonesia. Pada tingkat ideasional, hal ini ditunjukkan dengan pemahaman bahwa ASEAN merupakan soko guru dari kebijakan luar negeri ASEAN.² Hal ini pun diejawantahkan melalui peran Indonesia sebagai mediator dalam menengahi berbagai ketegangan dan menentukan agenda terhadap berbagai isu di kawasan.³ Salah satu momen penting yang mendemonstrasikan kepemimpinan Indonesia di ASEAN adalah ketika Indonesia mendapuk posisi ketua di ASEAN.

¹ Dewi Fortuna Anwar, “ASEAN Centrality Opportunities and Challenges,” dalam Srabani Roy Choudhury (ed.), *The Indo-Pacific Theatre Strategic Visions and Frameworks* (Routledge India, 2022); Ralf Emmers, “Indonesia’s role in ASEAN: A case of incomplete and sectorial leadership,” *The Pacific Review*, Vol. 27, Issue 4 (2014): 543-562, <https://doi.org/10.1080/09512748.2014.924230>

² Untuk memahami perdebatan mengenai posisi ASEAN sebagai sokoguru kebijakan luar negeri Indonesia, lihat: Rizal Sukma, “Indonesia needs a post-ASEAN foreign policy,” *The Jakarta Post*, 30 Juni 2009, <https://www.thejakartapost.com/news/2009/06/30/indonesia-needs-a-postasean-foreign-policy.html>

³ Untuk memahami peran Indonesia sebagai mediator secara detail, lihat: Marty Natalegawa, *Does ASEAN Matter? A View from Within* (ISEAS Publishing, 2018). Lihat juga: Christopher B. Roberts & Erlina Widyaningsih, “Indonesian Leadership in ASEAN: Mediation, Agency and Extra-Regional Diplomacy,” dalam Christopher B. Roberts, Ahmad D. Habir, & Leonard C. Sebastian (eds.), *Indonesia’s Ascent: Power, Leadership, and the Regional Order* (Palgrave Macmillan, 2015).

Posisi sebagai ketua ASEAN memiliki nilai yang strategis. Piagam ASEAN memberikan mandat bagi ketua ASEAN dalam memimpin berbagai pertemuan kunci, terutama Konferensi Tingkat Tinggi (KTT atau *Summit*) ASEAN sebagai mekanisme pembuatan kebijakan tertinggi di ASEAN yang kerap memfasilitasi pembahasan mengenai berbagai isu strategis. Selain itu, ketua ASEAN pun bertanggung jawab dalam menjamin sentralitas ASEAN, upaya penguatan hubungan eksternal ASEAN, serta menjamin hadirnya solusi yang efektif dan tepat waktu terhadap krisis atau isu-isu darurat lainnya di ASEAN.⁴ Dengan demikian, berbagai tanggung jawab dan fungsi di atas memberikan ruang yang substansial bagi ketua ASEAN dalam menentukan agenda dan dinamika ASEAN, sebagai sebuah kolektivitas, selama satu tahun.⁵

Secara historis, berbagai momen dan tindakan kunci yang mengukuhkan posisi Indonesia sebagai pemimpin ASEAN kerap hadir ketika Indonesia menjadi ketua ASEAN. Sebagai contoh, berbagai dokumen yang mengukuhkan fondasi institusional ASEAN, seperti *Bali Concord I* dan *Bali Concord II*, hadir ketika Indonesia menjadi ketua ASEAN. Selain itu, dalam situasi konflik atau ketika terdapat ketegangan di antara negara anggota dan/atau aktor di kawasan lainnya, Indonesia kerap berperan penting dalam upaya untuk menjembatani diplomasi di antara pihak-pihak yang berkonflik dan mendorong hadirnya solusi pada tingkat ASEAN untuk menghadapi konflik-konflik tersebut.⁶ Hal ini dapat ditunjukkan dengan memerhatikan respons Indonesia terhadap dua isu politik-keamanan utama yang harus dihadapi sebagai ketua ASEAN di tahun 2023, yakni sengketa Laut Cina Selatan dan isu kemanusiaan di Myanmar.

⁴ ASEAN, *The ASEAN Charter*, (ASEAN Secretariat, 2008).

⁵ Sanae Suzuki, "Can ASEAN offer a useful model? Chairmanship in decision-making by consensus," *The Pacific Review*, Vol. 34, Issue 5 (2021): 697-723, <https://doi.org/10.1080/09512748.2020.1727553>

⁶ Natalegawa, *Does ASEAN Matter?*

Sengketa Laut Cina Selatan merupakan salah satu isu yang relevan dalam pembahasan mengenai kepemimpinan Indonesia, mengingat peran historis Indonesia dalam mendorong dialog demi mempertahankan kesatuan ASEAN dalam menghadapi sengketa tersebut. Sejak masa Orde Baru, Indonesia telah melangsungkan *Track II Diplomacy* dan *Shuttle Diplomacy* untuk meningkatkan kepercayaan di antara negara-negara ASEAN dan Tiongkok. Salah satu upaya kunci dari Indonesia adalah penyelenggaraan “*Workshop on Managing Potential Conflict*” yang berlangsung secara tahunan.⁷ Pada era Reformasi, Indonesia cenderung mempertahankan upaya untuk menjamin persatuan ASEAN, terutama mengingat intensifikasi agresivitas Tiongkok di Laut Cina Selatan. Sebagai contoh, Indonesia merupakan salah satu pihak yang paling aktif dalam mendorong hadirnya konsensus mengenai sengketa Laut Cina Selatan setelah kegagalan ASEAN dalam menghasilkan *joint communique* di bawah keketuaan Kamboja pada tahun 2012.⁸ Indonesia pun kerap menyuarakan dan mengupayakan hadirnya solusi pada tingkat ASEAN terhadap sengketa tersebut demi menentang upaya Tiongkok untuk memprioritaskan dialog bilateral.

Sementara itu, dalam menghadapi situasi politik dan kemanusiaan di Myanmar, Indonesia pun telah mengerahkan berbagai upaya untuk mendorong hadirnya solusi pada tingkat ASEAN. Hal ini telah ditunjukkan sejak sebelum kudeta pada tahun 2021. Salah satu contoh yang signifikan adalah intensitas tekanan dari Indonesia dalam mendorong Myanmar untuk menerima bantuan kemanusiaan dari ASEAN selepas Siklon Nargis pada tahun

⁷ Hasjim Djalal, “The joint development concept in the South China Sea workshop process,” dalam Wu Shicun & Nong Hong (eds.), *Recent Developments in the South China Sea Dispute: The Prospect of a Joint Development Regime* (Routledge, 2014).

⁸ Untuk memahami detail mengenai upaya Indonesia dalam mendorong terbentuknya konsensus dalam konteks ini, lihat: Natalegawa, *Does ASEAN Matter?*

2008.⁹ Selain itu, dalam menghadapi persekusi dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Provinsi Rakhine pada tahun 2015, Indonesia, Malaysia, dan Thailand merupakan anggota yang aktif dalam mendorong upaya “hubungan konstruktif (*constructive engagement*)” dengan Myanmar.¹⁰

Peran Indonesia sebagai ketua ASEAN dalam menghadapi berbagai isu di atas perlu untuk dipertimbangkan, mengingat kompleksitas dari masing-masing isu serta ekspektasi yang hadir dengan posisi Indonesia sebagai “pemimpin alami” di ASEAN. Selain itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi pun menegaskan pada awal masa kepemimpinan Indonesia di ASEAN bahwa kedua isu di atas akan menjadi prioritas dalam keketuaan Indonesia, meskipun Indonesia menegaskan bahwa konflik dan isu tersebut tidak dapat diselesaikan hanya dalam satu tahun masa kepemimpinannya.¹¹ Selain itu, kendati berbagai upaya di atas, keketuaan Indonesia di tahun 2023 pun berlangsung di tengah meningkatnya keraguan terhadap posisi Indonesia sebagai pemimpin di ASEAN; dalam hal ini, berbagai observasi menunjukkan bahwa fokus Indonesia terhadap isu domestik dan diplomasi ekonomi dipandang telah meminimalisasi aktivisme Indonesia dalam berbagai mekanisme multilateral.¹²

⁹ Jürgen Haacke, “Myanmar, the Responsibility to Protect, and the Need for Practical Assistance,” *Global Responsibility to Protect*, Vol. 1 (2009): 156-184, <https://doi.org/10.1163/187598409X424289>

¹⁰ “Jokowi and the Rohingya,” *The Jakarta Post*, 27 Januari 2017, <https://www.thejakartapost.com/news/2017/01/27/jokowi-and-rohingya.html>

¹¹ “Indonesia Has Established Foundation to Resolve Myanmar Conflict, Foreign Minister Says,” *Tempo*, 29 Agustus 2023, <https://en.tempo.co/read/1765684/indonesia-has-established-foundation-to-resolve-myanmar-conflict-foreign-minister-says>

¹² Lihat: Kornelius Purba, “Jokowi’s foreign policy comes late, but internationally impactful,” *The Jakarta Post*, 26 November 2022, <https://www.thejakartapost.com/opinion/2022/11/25/jokowis-foreign-policy-comes-late-but-internationally-impactful.html>; Mabda Haerunnisa Fajrilla Sidiq, “Cornerstone No More? The Changing Role of ASEAN in Indonesian Foreign Policy,” *The Diplomat*, 5 Oktober 2022, <https://thediplomat.com/2022/10/cornerstone-no-more-the-changing-role-of-asean-in-indonesian-foreign-policy/>

Diskusi seri I disusun untuk membahas ekspektasi dan analisis terhadap kepemimpinan Indonesia sebagai ketua ASEAN di tahun 2023. Diskusi ini dipimpin oleh Prof. Dr. Mayling Oey-Gardiner (Ketua, Komisi Ilmu Sosial dalam Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia) sebagai moderator dan menghadirkan tiga pembicara berikut: Prof. Dr. Dewi Fortuna Anwar (Ketua Dewan Pengurus dari The Habibie Center dan Anggota Komisi Ilmu Sosial dalam Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia), Yuyun Wahyuningrum, M.A. (Wakil Indonesia untuk Komisi HAM Antar Pemerintah ASEAN (AICHR)), dan Prof. Hikmahanto Juwana (Rektor, Universitas Ahmad Yani). Selain itu, seri ini pun dibuka oleh pidato kunci dari Sidharto R. Suryodipuro (Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia) dan sambutan dari Prof. Dr. Satryo Soemantri Brodjonegoro (Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia). Terakhir, seminar ini ditutup oleh M. Hasan Ansori, Ph.D. (Direktur Eksekutif, The Habibie Center).

Dalam sambutannya, Prof. Dr. Satryo Soemantri Brodjonegoro dan Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro menilai peran Indonesia di ASEAN selalu diiringi inovasi yang menentukan posisi ASEAN sebagai organisasi regional. Sebagai contoh, TAC yang didasari oleh Bali Concord I disahkan di Indonesia pada tahun 1976. Inisiatif untuk membentuk komunitas ASEAN yang bersandar pada Bali Concord II ketika Indonesia menjadi Ketua ASEAN pada tahun 2003. Pada 2011, Indonesia juga berhasil meningkatkan sentralitas ASEAN dengan memperluas partisipasi East Asia Summit (EAS) dan pembentukan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). Sebagai anggota, Indonesia juga kerap mempromosikan berbagai inisiatif yang signifikan terhadap evolusi ASEAN, seperti ASEAN Charter dan adopsi ASEAN Outlook on Indo-Pacific (AOIP).

Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro mengakui bahwa krisis-krisis seperti pada sektor keuangan, energi, pangan, gangguan terhadap rantai pasok global, terjadinya perubahan iklim, dan persaingan

negara-negara adidaya telah mengubah tatanan kawasan dan dunia. Menurut Prof. Dr. Satrio Soemantri Brodjonegoro, peran Indonesia sebagai Ketua ASEAN sangatlah penting untuk menjamin implementasi Five-Point Consensus (5PCs) sebagai bentuk upaya ASEAN untuk meredakan krisis di Myanmar. Menurut Duta Besar Sidharto Suryodipuro, tindakan-tindakan yang akan Indonesia lakukan berakar pada pemahaman bahwa pelaksanaan Five-Point Consensus (5PCs) menjadi mutlak mengingat keputusan yang diambil dalam KTT adalah kewajiban yang perlu untuk dilaksanakan.

Selain itu, Indonesia harus memastikan keberlanjutan proses negosiasi *Code of Conduct of Parties (CoC) on the South China Sea*. Indonesia perlu menekankan pentingnya implementasi sentralitas ASEAN yang lebih efektif akan berpengaruh besar dalam kemajuan proses negosiasi CoC on the South China Sea. Peran aktif Indonesia sebagai Ketua ASEAN juga akan tercermin dari respon ASEAN terhadap isu-isu geopolitik, seperti rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok. Dalam rivalitas tersebut, kiprah Indonesia akan dilihat berdasarkan peran serta ASEAN di Indo-Pasifik dan sentimen ASEAN terhadap potensi hadirnya kompetisi antar negara adidaya di Asia Tenggara. Hal tersebut juga dapat menjelaskan karakter inklusif dan konstruksi Indo-Pasifik yang dicetuskan oleh ASEAN melalui AOIP.

**I. A. Prioritas Kepemimpinan Indonesia
di ASEAN dalam Bidang Politik dan Keamanan
Prof. Dr. Dewi Fortuna Anwar
(Ketua Dewan Pengurus, The Habibie Center
dan Anggota Komisi Ilmu Sosial, Akademi Ilmu
Pengetahuan Indonesia)**

ASEAN memiliki potensi besar untuk berkontribusi terhadap perdamaian dan stabilitas regional melalui pembangunan berbagai norma. Walaupun selama ini norma-norma yang terbangun tidak

membentuk mekanisme yang mengikat, tetapi negara anggota ASEAN memberikan penghormatan yang baik atas struktur norma tersebut. Dalam hubungan antar negara tetangga, TAC merupakan *regional code of conduct* yang sangat penting dan menjadi syarat utama bagi negara-negara luar yang menjalin hubungan dengan ASEAN. Seperti yang dikatakan dalam *Bali Concord I* tahun 1976, setiap konflik harus diselesaikan secara damai dengan tidak melibatkan kekerasan. ASEAN juga memiliki Deklarasi ZOPFAN (Zone of Peace, Freedom and Neutrality) pada tahun 1971 yang menyebutkan bahwa wilayah Asia Tenggara merupakan wilayah yang damai dan tidak terlibat dalam konflik, serta mandiri. ASEAN juga memiliki Perjanjian *Southeast Asian Nuclear Weapon Free Zones* (SEANWFZ). Perjanjian SEANWFZ mengisyaratkan larangan bagi negara anggota untuk memiliki atau menjadi tuan rumah senjata nuklir.

ASEAN juga berkontribusi terhadap *peace and stability* di kawasan dengan memainkan peran mengelola hubungan dengan negara-negara besar dengan berlandaskan pada konstruksi *ASEAN Centrality*. ASEAN menjadi penghimpun utama dinamika politik kawasan, yang lebih dikenal sebagai multilateralisme Indo-Pasifik. Di titik inilah forum-forum ASEAN menjadi tempat berkumpul aktor-aktor kawasan, termasuk rival, aliansi, dan lain-lain. Dalam hal ini, Indonesia sebagai negara terbesar di ASEAN, selalu dilihat sebagai *Primus Inter Pares*. Indonesia terkadang menerima berbagai kritik karena dinilai tidak memainkan kepemimpinan yang lebih asertif. Menurut Profesor Dewi, dalam satu organisasi, dimana keanggotaannya memiliki kekuatan dan kapasitas yang bervariasi, kepemimpinan yang terlalu asertif bisa berdampak pada kurang berfungsinya organisasi tersebut. Sebagai contoh, India dilihat memainkan perannya yang asertif di *South Asian Association for Regional Cooperation* (SAARC) sehingga SAARC kurang berkembang sebagai organisasi regional. Dalam konteks

ASEAN kepemimpinan Indonesia, terutama selama pemerintahan Orde Baru, cenderung menerapkan filosofi kepemimpinan Jawa, *Tut Wuri Handayani*, atau memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Dengan semakin bertambahnya keanggotaan ASEAN, mendorong dari belakang saja dinilai tidak cukup sehingga diterapkan juga kepemimpinan yang *Ing Madyo Mbangun Karso*, yaitu membangkitkan atau menggugah semangat dari tengah-tengah.

Ketetuaan dalam ASEAN bergilir, tapi kepemimpinan tidak bergilir. Hal ini kemudian menjadi tantangan bagi Indonesia, terutama Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, di tengah ekspektasi yang begitu besar akan keketuaan dan juga kepemimpinan Indonesia di ASEAN. Ekspektasi yang begitu besar tersebut juga berangkat dari capaian-capaian penting ASEAN yang terjadi ketika Indonesia menjadi ketua (pada tahun 1976, 1996, 2003, dan 2011), serta keberhasilan Indonesia menyelesaikan presidensi di G20 pada tahun 2022 di tengah situasi sulit setelah invasi Rusia atas Ukraina. Ditengah banyak skeptisme, dengan politik luar negeri bebas-aktif dan kepiawaian dalam berdiplomasi untuk merangkul pihak-pihak yang bertikai, KTT G20 di bawah presidensi Indonesia dapat menghasilkan konsensus dan mengeluarkan *Bali Leaders' Declaration*.

Menurut Profesor Dewi, Ketetuaan Indonesia di ASEAN tahun 2023 berada pada posisi yang tidak mudah, terutama dikarenakan faktor *strategic environment*, baik eksternal maupun internal yang menantang. Pada faktor *strategic environment* eksternal didominasi isu kebangkitan dan kebijakan Tiongkok yang dilihat semakin asertif dan agresif di kawasan, yang terlihat dalam Sengketa Laut Cina Timur dengan Jepang. Kemudian kita lihat Sengketa Laut Cina Selatan dengan beberapa negara anggota ASEAN. Di kawasan Indo-Pasifik secara keseluruhan, Tiongkok juga memainkan peranan signifikan di Pasifik Selatan, yang telah

lama menjadi kawasan di mana AS memainkan peranannya yang sangat penting. Tapi rivalitas ini tidak terjadi hanya antara Tiongkok dengan Jepang atau AS, akan tetapi juga antara Tiongkok dengan India serta antara Tiongkok dengan Australia. Disamping itu juga muncul berbagai aliansi minilateralisme penyeimbang kekuatan Tiongkok dengan adanya QUAD (Quadrilateral Security Dialogue), yang terdiri dari AS, Australia, Jepang, dan India dan AUKUS antara AS, Inggris, dan Australia.

Sementara di lingkungan internal, ASEAN juga memiliki beberapa tantangan yang perlu diatasi. Tantangan-tantangan penting tersebut diantaranya membantu mengatasi Krisis Myanmar, mempertahankan *ASEAN Centrality* di tengah banyaknya perbedaan di antara anggota ASEAN, seperti perbedaan politik, perbedaan ekonomi, dan perbedaan *strategic culture*. Selain itu, keterbatasan institusi ASEAN banyak berakar pada berbagai perbedaan antar anggota ASEAN.

Keketuaan Indonesia di ASEAN memiliki dua prioritas besar, yakni prioritas eksternal dan internal. Prioritas eksternal diantaranya adalah penyelesaian negosiasi CoC sesuai dengan UNCLOS 1982. *Declaration on Conduct of Parties In The South China Sea* telah ditandatangani 2002 dan *Terms of Reference CoC* disetujui pada tahun 2011. Sehingga terbesit harapan setelah lebih dari satu dekade negosiasi bisa diselesaikan pada Keketuaan Indonesia di ASEAN tahun 2023. Prioritas eksternal selanjutnya adalah memperkuat *ASEAN-driven "inclusive regional architecture"* untuk mempertahankan *ASEAN Centrality* melalui mekanisme ASEAN. Prioritas eksternal lainnya adalah implementasi dari AOIP.

Sementara untuk prioritas internal, krisis politik di Myanmar merupakan ujian berat bagi ASEAN. Krisis ini telah melemahkan kredibilitas dari ASEAN, sehingga ini mempersulit pencapaian dari *ASEAN Community*. Profesor Dewi berpendapat bahwa

ada dua hal yang perlu diperhatikan. Pertama, status dan posisi Myanmar di dalam ASEAN. Penjatuhan sanksi yang tegas pada Myanmar diperlukan sebagai hukuman atas pelanggaran nilai-nilai dalam Piagam ASEAN dan sekaligus untuk mencegah agar Myanmar tidak menjadi penghalang bagi efektivitas sebagai organisasi baik ke dalam maupun ke luar. Kemudian, perlu adanya *roadmap* jangka panjang untuk mengatasi Krisis Myanmar karena krisis ini belum dapat diselesaikan dalam waktu yang pendek dan memerlukan bantuan banyak pihak. Mengingat dalam dua tahun ini belum banyak kemajuan dalam implementasi *Five Point Consensus* (5PCs), sehingga penanganan krisis harus berfokus pada penghentian kekerasan, pembukaan akses bantuan kemanusiaan, penunjukan dan kunjungan Utusan Khusus ASEAN ke Myanmar, dan pelaksanaan dialog dengan semua pihak. Salah satu yang perlu diperhatikan dalam penyelesaian Krisis Myanmar ini adalah bagaimana usaha ASEAN dapat menjadi satu usaha yang berkelanjutan, tidak berubah-ubah berdasarkan ketekuaan ASEAN. Profesor Dewi menekankan perlunya penunjukan Utusan Khusus Tetap ASEAN untuk Myanmar. Terakhir, ada beberapa isu lain yang tidak memiliki *crisis management* dalam institusi ASEAN, sehingga perlu dipertimbangkan mekanisme penanganan pada saat krisis.

Profesor Dewi juga menekankan kembali mengenai finalisasi keanggotaan penuh Timor Leste dalam ASEAN. Dengan kedekatan sejarah bagi Indonesia dan *strategic imperatives*, diharapkan Timor Leste tidak berjalan sendirian di tengah dinamika regional. Selain itu, ASEAN juga perlu meningkatkan perannya di tingkat global, diantaranya peran ASEAN sebagai pengamat di Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Indonesia pernah bercita-cita untuk merealisasikan pembentukan *ASEAN Peacekeeping Force*.

I.B. Evaluasi Perkembangan Konflik dan Implementasi Five-Point Consensus (5 PCs) di Myanmar

Yuyun Wahyuningrum, M.A.

(Perwakilan Republik Indonesia di ASEAN

***Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR)*)**

Dalam paparannya, Yuyun Wahyuningrum mencatat beberapa pencapaian ASEAN dalam kontribusi penyelesaian krisis di Myanmar pada tahun 2021 dan 2022. Diantaranya adalah kesepakatan *Five-Point Consensus* (5PCs) pada tanggal 24 April 2021 yang menjadi dasar penting dalam memahami upaya-upaya yang telah dan akan dilaksanakan oleh ASEAN terkait dengan Myanmar. Upaya ASEAN untuk menangani krisis di Myanmar didukung dengan penunjukan Erywan Yusof sebagai Utusan Khusus ASEAN untuk Myanmar oleh Brunei Darussalam sebagai pemegang Ketekuaan ASEAN 2021. Selain itu, pada rentang Oktober hingga November 2021, Myanmar tercatat tidak menghadiri KTT ASEAN ke-38 dan 39, serta tidak ikut serta dalam beberapa konferensi tingkat tinggi lainnya di kawasan, seperti *East Asia Summit* dan *ASEAN-India Summit*. Menurutnya, absennya Myanmar dalam berbagai forum dalam ASEAN berlanjut hingga akhir 2022. Perlu dicatat bahwa pemerintahan hasil kudeta Myanmar tidak diakui sebagai pemimpin yang sah oleh ASEAN sehingga Myanmar hanya diperbolehkan menghadiri pertemuan-pertemuan tingkat teknis ASEAN saja.

Yuyun selanjutnya mengemukakan bahwa warga Myanmar memasuki tahun 2023 dengan ketidakpastian dikarenakan krisis politik yang berkepanjangan yang berujung pada krisis kemanusiaan, krisis HAM, krisis sosial, dan lain-lain. Hampir setengah dari populasi Myanmar hidup dalam kemiskinan. Selain itu, 1,5 juta manusia telah berpindah sejak dimulainya kudeta hingga saat seminar ini dilaksanakan. *The United Nations High*

Commissioner for Refugees (UNHCR), lembaga internasional yang mendukung humanitarian di bawah PBB, mencatat per Januari 2023 sedikitnya ada 671 insiden kekerasan terhadap petugas kesehatan. Kemudian, sebanyak 750 petugas kesehatan ditangkap dan 140 kali rumah sakit digrebek. Sebanyak 56 petugas kesehatan dibunuh sejak tanggal 1 Februari sampai 20 September 2022. *ASEAN Leaders Review and Decision* di bulan November 2022 berhasil mencatat bahwa situasi Myanmar masih kritis dan sangat rapuh sehingga mempengaruhi pembangunan ASEAN.

Terkait salah satu poin dari 5PCs yaitu aspek pengakhiran kekerasan (*cessation of violence*), Yuyun melihat pelaksanaannya masih menemui kendala dan belum mencatat kemajuan secara kuantitatif. Kemudian, terkait *Special Envoy of ASEAN*, walaupun telah terlihat kemajuan karena mekanisme telah tersusun, Yuyun menyinggung kembali masukan dari Prof. Dewi Fortuna Anwar bahwa *Special Envoy of ASEAN* seharusnya bukan berasal dari ketua yang berganti setiap tahun agar dapat meningkatkan ketahanan dan efisiensi upaya bersama. Dalam hal bantuan kemanusiaan, ASEAN menghadapi tantangan terdapat pada distribusi bantuan, terutama pada akses masuk ke Myanmar yang sulit.

Yuyun juga menekankan bahwa AICHR telah menyatakan ketertarikannya untuk membantu dalam situasi Myanmar. Namun, usaha tersebut perlu dimandatkan oleh Kementerian Luar Negeri. AICHR telah memiliki agenda khusus tentang perkembangan terkini di ASEAN, terutama untuk merespon banyaknya komentar yang dialamatkan terkait situasi HAM di negara anggota ASEAN, terutama isu HAM di Myanmar. Banyak laporan yang masuk dari masyarakat sipil di dalam Myanmar dan di luar Myanmar terkait minimnya akses bagi warga Myanmar untuk menyampaikan kekhawatirannya.

The ASEAN Human Rights Dialogue (AHRD) merupakan wadah yang digunakan untuk berdiskusi dan banyak dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Luar Negeri, dari Kementerian Hukum dan HAM, dari Kementerian Dalam Negeri, dari Kementerian Perempuan dan Anak dari 10 negara anggota ASEAN. AHRD juga diikuti oleh perwakilan dari Komisi Nasional HAM (Komnas HAM). Yuyun, sebagai perwakilan Indonesia dalam AICHR, telah menyampaikan pendekatan HAM di dalam 5PCs serta pada aspek pelaksanaannya. Pemberian mandat untuk memfasilitasi kelompok-kelompok yang bertikai, termasuk kelompok tentara etnis, merupakan hal yang memungkinkan. Namun, kelompok-kelompok penggiat HAM, misalnya masyarakat sipil dan akademisi, juga dapat berhubungan dengan AICHR. Kemudian, AICHR menjadi bagian dari penasihat *special envoy*. Hal ini memungkinkan AICHR untuk memberikan masukan berupa laporan-laporan tentang kejadian pelanggaran HAM. Sehingga, keputusan yang diambil oleh *special envoy* harus didasari pada sara-suara dari dalam dan relevan.

Arah kebijakan dan peran Indonesia adalah dengan mendirikan *Office of the Special Envoy*. Indonesia terus menekankan pentingnya dialog kebangsaan dan upaya rekonsiliasi nasional di Myanmar sebagai prioritas rencana implementasi. Terkait rencana implementasi, Yuyun menjelaskan bahwa setelah pertemuan *retreat* antara Menteri Luar Negeri di ASEAN, telah disampaikan rencana implementasi 5PCs. Ditekankan juga bahwa *closed diplomacy* dan *middleman diplomacy* sebagai pendekatan dalam pelaksanaan rencana implementasi 5PCs. Terkait penunjukan *special envoy*, Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa akan mengutus seorang jenderal dari militer, agar terjadi *general-to-general talks* terkait krisis HAM di Myanmar. Kedepannya, upaya ASEAN dalam menangani isu Myanmar dapat lebih inklusif, terutama melalui pendekatan kemanusiaan, menggunakan semua dinamisme di ASEAN. Kemudian yang dilibatkan bukan hanya kaum elit, tetapi

juga masyarakat dari akar rumput. Penting untuk melibatkan pemangku kepentingan terkait dalam interaksi-interaksi yang lebih fleksibel dan informal agar dapat membuka dialog yang inklusif.

I.C. Perkembangan Negosiasi *Code of Conduct* di Laut Cina Selatan (LCS) dan Arah Kebijakan dan Peran Indonesia dalam Menyelesaikan Sengketa LCS

Prof. Hikmahanto Juwana Ph.D.

(Rektor, Universitas Jenderal Achmad Yani)

Profesor Hikmahanto Juwana memulai paparannya dengan menyinggung kembali tema yang diusung oleh Indonesia sebagai ketua ASEAN – *ASEAN Matters: Epicentrum of Growth*. Dalam melihat pentingnya mengukur klausa “*ASEAN matters*”, penting bagi Indonesia memiliki inisiatif-inisiatif baru semasa keketuaannya. Saat menjadi presiden G20, Indonesia telah banyak mengusulkan inisiatif-inisiatif yang mengarah pada terobosan bagi perekonomian dunia. Hal tersebut dapat dilihat dari langkah-langkah yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Misalnya inisiatifnya mengunjungi Ukraina, Rusia, dan menghadiri pertemuan G7 untuk memastikan langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk meredam konflik. Indonesia bisa muncul dengan *Leaders Declaration* ditengah keraguan banyak negara yang telah menyampaikan rasa pesimisnya terkait deklarasi tersebut.

Terkait dengan perkembangan dari negosiasi CoC di Laut Cina Selatan, CoC bertujuan untuk membangun ketentuan bagi perilaku negara-negara di Laut Cina Selatan. Profesor Hikmahanto melihat potensi CoC untuk menghindari insiden antar negara di Laut Cina Selatan, mengelolanya dan menyelesaikannya secara damai, serta bagaimana wilayah sengketa tidak masuk ke dalam perang dingin.

Upaya untuk memastikan keamanan laut dan kebebasan berlayar di Laut Cina Selatan merupakan hal yang penting. Tindakan Tiongkok yang sangat agresif di Laut Cina Selatan merupakan bentuk upaya Tiongkok untuk memenuhi kepentingan nasionalnya. Dengan penduduk yang lebih dari 1 miliar, tindakan Tiongkok yang agresif dapat dilihat sebagai kebutuhan untuk memenuhi kepentingan nasionalnya, termasuk ketahanan pangan dan ketahanan energi.

Dalam proses negosiasi CoC, pada Agustus 2018, negara anggota ASEAN dan Tiongkok menyepakati *Single Draft South China Sea Code of Conduct Negotiating Text* (SDNT). SDNT tersebut merupakan tonggak penting dari negosiasi yang, hingga kini, prosesnya terus diperpanjang. Tantangan utama dari menyepakati SDNT sebenarnya selain dari *wordings*, adalah melihat pentingnya konteks. Pertama, tantangan bagi Indonesia adalah Pandemi COVID-19. Tugas Indonesia untuk memulai kembali negosiasi CoC setelah Pandemi COVID-19 dan harus dapat memimpin negosiasi CoC untuk menyepakati apakah instrumen tersebut merupakan ketentuan yang mengikat secara hukum. Negara anggota ASEAN kemungkinan besar akan membuat CoC ini sebagai instrumen yang mengikat secara hukum. Namun, Tiongkok dalam hal ini akan sangat sulit menyepakati CoC sebagai instrumen mengikat secara hukum.

Melihat lebih dalam terkait sengketa di Laut Cina Selatan, penyelesaian sengketa bukanlah hal yang mudah. Terdapat empat isu penting dalam sengketa tersebut. Pertama adalah isu kedaulatan atas pulau dan bebatuan. Selain itu, isu *freedom of navigation* menjadi salah satu isu yang kritis terutama jika dikaitkan dengan eksistensi kepentingan negara anggota ASEAN, AS dan sekutu, serta Tiongkok di sekitar perairan Laut Cina Selatan. Selanjutnya adalah tindakan Tiongkok yang tidak mengakui Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Selain itu, faktor persaingan

antara AS dan sekutunya dengan Tiongkok turut mempengaruhi iklim geopolitik kawasan. Sehingga, penyelesaian sengketa sangat bergantung dan diwarnai oleh persaingan kedua major powers tersebut.

Tiongkok semakin mengukuhkan diri sebagai negara ekonomi yang kuat dan bahkan menggunakan politik ekonomi melalui asistensi keuangan untuk mempengaruhi negara lain. Tiongkok juga dapat mengerahkan kekuatan militernya yang telah mengalami pembangunan yang sangat pesat dengan tidak berkompromi dalam hal klaim Sembilan Garis Putus (*nine-dash line*). Agresivitas Tiongkok untuk menguasai sumber daya alam baik di kolom laut maupun dasar laut ini terlihat pada maneuvranya dari waktu ke waktu. Seperti reklamasi pulau, keterlibatan dalam insiden-insiden di Laut Cina Selatan, menerbitkan undang-undang yang mewajibkan kapal-kapal komersil untuk mendaftar ketikamelewati Laut Cina Selatan, dan mempersenjatai *coast guard* dengan persenjataan.

Terkait ekspektasi terhadap Indonesia dalam hal negosiasi CoC, suasana di kawasan menjadi tidak kondusif untuk bernegosiasi. Selain itu, solidaritas negara anggota ASEAN pun dalam keadaan yang menurun. Sehingga, faktor internal antara negara anggota ASEAN ini turut menjadi faktor yang mempengaruhi keberlanjutan negosiasi CoC. Indonesia, yang tidak pernah dan tidak akan pernah mengakui klaim Sembilan Garis Putus (*nine-dash line*), tidak akan menyelesaikan sengketa Laut Cina Selatan. Bagi Indonesia, hal yang terpenting adalah untuk memastikan konflik bersenjata tidak terjadi di Laut Cina Selatan serta Indonesia terus mengupayakan agar CoC dapat disepakati. Ketekuaan Indonesia di ASEAN merupakan momentum yang tepat karena Indonesia akan mengedepankan dialog dan menjadi *honest peace broker* bagi negara-negara lain yang berkonflik di Laut Cina Selatan.

I. D. Diskusi

Pertanyaan 1

Apakah komentar para narasumber terkait Indonesia selaku ketua yang mengirimkan utusan jenderal kepada militer junta di Myanmar yang dapat menimbulkan kesan bahwa sikap tersebut merupakan bentuk “*endorsement* (dukungan)”?

Jawaban 1

Prof. Hikmahanto Juwana Ph.D.

(Rektor, Universitas Jenderal Achmad Yani)

Ide pengiriman jenderal diharapkan dapat membantu menimbulkan stimulasi akan rasa tanggung jawab dari pihak junta militer. Hal ini dikarenakan adanya kesamaan perspektif dunia militer.

H.E. Yuyun Wahyuningrum, M.A.

Dalam hal ini, Kamboja juga pernah dikritik dengan kedatangan Hun Sen dan Menteri Luar Negeri Kamboja ke Naypyidaw yang berkaitan dengan *endorsement*. Keterlibatan di sini tidak memberikan legitimasi karena selama bukan presiden yang bertemu, tidak akan menjadi sebuah masalah.

Prof. Dr. Dewi Fortuna Anwar

Secara prinsip, ide untuk mengirimkan seorang militer dapat memberikan pemahaman terkait transisi demokrasi Indonesia. Di saat yang sama, juga pemahaman tentang dampak negatif jangka panjang dari pemerintahan militer di politik. Profesor Dewi tidak sepakat jika yang dikirimkan adalah anggota militer aktif yang membawa beban dalam posisinya, misalnya posisi struktural. Hal ini berkaitan dengan Indonesia yang mengirim mantan jenderal sebagai utusan negara kepada junta militer.

Pertanyaan 2

Melihat perspektif Indonesia sebagai Ketua ASEAN, apa potensi yang dimiliki Indonesia selain meningkatkan kestabilan geopolitik dan HAM?

Jawaban 2

Prof. Hikmahanto Juwana Ph.D.

Hal tersebut tergantung bagaimana kejelian Indonesia dalam melihat peluang. Baik dari sisi diplomat Indonesia, akademisi Indonesia, maupun pengambil kebijakan Indonesia, penting bagi tiap pemangku kepentingan untuk melihat peluang-peluang tersebut.

Pertanyaan 3

Dari konflik sejarah Timor-Leste, apa yang bisa kita pelajari dalam penanganan isu di Myanmar?

Jawaban 3

H.E. Yuyun Wahyuningrum, M.A.

Konflik Timor-Leste dan Myanmar merupakan isu yang berbeda dan tidak bisa disamakan. Isu Myanmar adalah isu domestik dan kudeta tersebut dianggap melanggar *ASEAN Charter* tentang *Constitutional Government*.

Prof. Dr. Dewi Fortuna Anwar

Isu Myanmar dan Timor-Leste bukan merupakan isu yang *apple to apple*, sehingga pelajaran dari kasus Timor-Leste tidak dapat digunakan untuk kasus Myanmar.

Pertanyaan 4

Indonesia masih kurang mampu dalam menyelesaikan masalah domestik kita sendiri, seperti isu di Papua yang sampai sekarang masih belum ada jalan keluarnya. Bagaimana kita membantu dalam lingkup internasional geo politik dan keamanan?

Jawaban 4

H.E. Yuyun Wahyuningrum, M.A.

Adanya isu dalam negeri seperti isu Papua bukan berarti Indonesia tidak bisa memberikan masukan terkait penanganan konflik di negara lain. Selain itu, konflik di Myanmar merupakan konflik yang dapat mempengaruhi stabilitas regional. Sedangkan isu Papua masih dianggap sebagai isu domestik yang masih mampu dihadapi oleh Indonesia.

Prof. Dr. Dewi Fortuna Anwar

Dalam merespons isu Papua, Indonesia menggunakan berbagai pendekatan seperti pendekatan *prosperity* dan dialog yang terus berlanjut. Dengan masalah yang banyak dimiliki Indonesia memperlihatkan pendekatan Indonesia dalam memajukan demokrasi dan HAM tidak cenderung *preaching*. Indonesia dapat memberikan pengalaman-pengalaman menghadapi isu demokrasi dan HAM di ASEAN.

Pertanyaan 5

Filipina dan Tiongkok tetap membangun skema kerjasama terlepas dari isu kedaulatan dan kepentingan sumber daya di Laut Cina Selatan. Seperti apa peluang kerjasama pembangunan berkelanjutan antara Tiongkok dan Indonesia?

Jawaban 5

Prof. Hikmahanto Juwana Ph.D.

Indonesia sebagai *peace broker* akan sulit untuk menjalin kerjasama dengan Tiongkok dikarenakan ada unsur kepentingan dalam menjalankan kebijakan luar negerinya dan berkaitan dengan politik bebas aktif Indonesia.

Pertanyaan 6

Sanksi apa yang dapat diberikan kepada Myanmar dan pertimbangan apa yang dapat dilihat ASEAN untuk mengakui representatif Myanmar? Apa saja *tipping points* dan *key points* untuk negosiasi pemerintah Indonesia terkait Krisis Myanmar?

Jawaban 6

H.E. Yuyun Wahyuningrum, M.A.

Jika ASEAN dapat menangani konflik Myanmar dan pemerintahan Myanmar dapat kembali berkuasa, perlu ada kesepakatan di kawasan supaya isu tersebut tidak terulang kembali, misalnya, perlu ada *Constitutional Government*.

Pertanyaan 7

Bagaimana langkah terbaik Indonesia sebagai Ketua ASEAN dalam menyikapi konflik Laut Cina Selatan agar tidak mempertajam persaingan antara Tiongkok dan Amerika Serikat?

Jawaban 7

Prof. Hikmahanto Juwana Ph.D.

Indonesia dengan kebijakan politik luar negeri bebas aktif, oleh karena itu perlu melihat dinamika kedekatan kepemimpinan pada saat ini, presiden yang berkuasa, dan afiliasi yang dimiliki perlu menjadi pertimbangan dalam melihat bagaimana aspirasi dan sistem demokrasi yang ada.

Pertanyaan 8

Apakah konflik di ASEAN ini akan menjadi konflik yang besar seperti yang terjadi di Eropa Timur saat ini?

Jawaban 8

Prof. Dr. Dewi Fortuna Anwar

Indonesia menjalankan pemerintahannya yang pragmatis guna memenuhi kepentingan nasionalnya. Indonesia sebagai negara cenderung menganggap poin perdamaian dan stabilitas sebagai sesuatu yang ada tanpa harus diperjuangkan, yang berkaitan dengan berjalannya perdagangan Indonesia. Rakyat perlu melihat dan ingat bahwa perdamaian, keamanan, dan stabilitas regional adalah sesuatu yang dibangun. Untuk membangun kemakmuran butuh stabilitas dan keamanan kawasan, baik di dalam maupun di luar ASEAN.

II

Epicentrum of Growth: Menuju ASEAN yang Inklusif dan Terintegrasi di Bawah Keketuaan Indonesia

“*ASEAN Matters: Epicentrum of Growth*” memuat prioritas yang Indonesia tetapkan sebagai ketua ASEAN pada tahun 2023. Slogan tersebut diumumkan selepas penyerahterimaan posisi ketua dari Kamboja ke Indonesia pada bulan November 2022. Slogan tersebut memuat dua pilar. Pilar “*ASEAN Matters*” menunjukkan keinginan Indonesia untuk mempertahankan relevansi ASEAN dalam menghadapi tantangan dan menjaga stabilitas di kawasan. Sementara itu, pilar “*Epicentrum of Growth*” memuat tujuan untuk menjadikan negara-negara di Asia Tenggara untuk menjadi “pusat pertumbuhan dunia,” yang memuat empat elemen: kesehatan, ketahanan energi, ketahanan pangan, dan stabilitas keuangan.¹³ Berbagai elemen ini menunjukkan kontinuitas dari presidensi Indonesia di G20 pada tahun 2022.

Pilar *Epicentrum of Growth* merefleksikan fokus Indonesia dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi serta mengerahkan instrumen diplomasi untuk memenuhi tujuan ekonomi. Dalam mewujudkan aspirasi tersebut, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjelaskan bahwa Indonesia akan mendorong berbagai kerja sama yang konkret dan dengan dampak yang dapat dirasakan oleh masyarakat.¹⁴

¹³ “Making ASEAN the Epicentrum of Growth,” *ANTARA News*, 25 November 2022, <https://en.antaranews.com/news/262265/making-asean-the-epicentrum-of-growth>

¹⁴ Thea Fathanah Arbar, “Mengenal Tema KTT ASEAN “Epicentrum of Growth”, Apa Itu?,” *CNBC Indonesia*, 5 Mei 2023, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230505140537-4-434789/mengenal-tema-ktt-asean-epicentrum-of-growth-apa-itu>

Dengan hadirnya pilar ini, ASEAN menunjukkan besarnya fokus yang didedikasikan Indonesia dalam merealisasikan aspirasi untuk menjadikan Asia Tenggara sebagai pusat pertumbuhan dunia serta menjaga performa perekonomian Asia Tenggara yang relatif lebih baik dibandingkan rata-rata dunia.¹⁵ Hal ini berlandaskan pada observasi bahwa rata-rata pertumbuhan ekonomi Asia Tenggara selalu berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi global.¹⁶

Besarnya perhatian terhadap isu ekonomi menunjukkan arah kebijakan Indonesia dalam menavigasi berbagai tantangan global terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan regional. Dalam hal ini, ASEAN masih harus berupaya untuk bangkit dari berbagai dampak pandemi terhadap perekonomian kawasan. Selain itu, rivalitas geopolitik telah berdampak secara signifikan terhadap dinamika ekonomi global. Hal ini terlihat dari dampak dari konflik geopolitik terhadap krisis pangan dan fluktuasi ekonomi. Dengan berjalannya proses integrasi ekonomi regional, ASEAN menghadapi tantangan untuk menjamin bahwa pertumbuhan ekonomi “tidak akan meninggalkan siapapun (*leave no one behind*).”

Meskipun upaya integrasi ekonomi kawasan telah bergulir dan dengan didorongnya institusionalisasi melalui Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), ASEAN masih menghadapi berbagai tantangan dalam mendorong upaya integrasi ekonomi. Sejak tahun 2008, perdagangan intra-ASEAN dinilai mengalami stagnasi dengan persentase 21-25% dari jumlah seluruh nilai perdagangan. Hal ini disebabkan oleh minimnya investasi intra-ASEAN dan minimnya kapasitas sektor logistik di dalam negara anggota. Selain itu,

¹⁵ Marcheilla Ariesta, “Apa Arti Tema ‘ASEAN Matters: Epicentrum of Growth’ Indonesia?,” *Medcom*, 26 November 2022, https://www.medcom.id/internasional/asean/GNIQd1yb-apa-arti-tema-asean-matters-epicentrum-of-growth-indonesia#google_vignette

¹⁶ Azis Kurmala, “Menyongsong Keketuaan Indonesia pada ASEAN 2023,” *ANTARA News*, 21 Desember 2022, <https://www.antaranews.com/berita/3316358/menyongsong-keketuaan-indonesia-pada-asean-2023>

industri yang terdapat di antara negara-negara anggota pun dinilai cenderung mirip, sehingga kegiatan ekspor sulit untuk dilakukan ke sesama negara anggota ASEAN.¹⁷

Keraguan terhadap kemampuan MEA dalam merealisasikan integrasi kawasan pun turut diiringi dengan pandangan skeptis terhadap kontribusi ASEAN dalam menghadirkan manfaat yang nyata bagi masyarakat ASEAN. ASEAN kerap menerima kritik sebagai sebuah organisasi yang elitis, mengingat karakter organisasinya yang menggarisbawahi sentralitas negara.¹⁸ Selain itu, berbagai ketimpangan masih belum dapat diatasi, terlepas dari aspirasi MEA dalam menjembatani kesenjangan dalam perkembangan ekonomi. Sebuah laporan yang dirilis oleh UNDP dan ASEAN menunjukkan bahwa kesenjangan tidak hanya hadir dalam bentuk kesenjangan di antara negara anggota; kesenjangan di antara masyarakat urban dan pedesaan, serta kesenjangan di antara masyarakat yang berada di dalam wilayah urban, merupakan bentuk kesenjangan yang dinilai harus mendapatkan perhatian seiring dengan upaya ASEAN untuk memulihkan kembali situasi perekonomian kawasan selepas Pandemi COVID-19.¹⁹

Besarnya perhatian yang didedikasikan untuk isu ekonomi di bawah ketetuaan Indonesia menunjukkan bahwa ketetuaan Indonesia di ASEAN pada tahun 2023 dapat menjadi momentum dalam menghadapi berbagai tantangan yang hadir dalam upaya untuk mewujudkan Asia Tenggara sebagai pusat pertumbuhan

¹⁷ Cyprianus Anto Saptowalyono & Laraswati Ariadne Anwar, "Intra-ASEAN Trade Remains Stagnant," *Kompas.id*, 30 Januari 2023, <https://www.kompas.id/baca/english/2023/01/30/intra-asean-trade-remains-stagnant>

¹⁸ Amitav Acharya, "The Evolution and Limitations of ASEAN Identity," in Aileen Baviera & Larry Maramis (eds.), *Building ASEAN Community: Political-Security and Socio-cultural Reflections*, (Economic Research Institute for ASEAN and East Asia, 2017).

¹⁹ UNDP, "Reducing Inequality in the Decade of Action to Achieve the SDGs and Accelerate Post-Pandemic Recovery", (Bangkok, 2022), <https://asean.org/wp-content/uploads/2022/08/FINAL-Policy-Brief-on-Reducing-Inequality.pdf>

dunia. Diskusi seri II hadir untuk memahami dan memberikan pandangan terhadap langkah yang telah Indonesia ambil di bawah pilar ekonomi di tengah masa keketuaannya di ASEAN. Diskusi ini dipimpin oleh Prof. Dewi Fortuna Anwar (Ketua Dewan Pengurus dari The Habibie Center dan Anggota Komisi Ilmu Sosial dalam Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia) sebagai moderator. Kemudian, diskusi ini menghadirkan Ir. Netty Muharni, MURP (Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional dan Sub-Regional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI), Dr. Zamroni Salim (Peneliti Senior dari The Habibie Center dan Direktur dari Pusat Penelitian Makro Ekonomi dan Keuangan, Badan Riset dan Inovasi (BRIN)), dan Dr. Fithra Faisal Hastiadi (Direktur Eksekutif, Next Policy) sebagai pembicara. Diskusi ini dibuka oleh kata sambutan dari Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo (Wakil Ketua, Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia) serta ditutup oleh Prof. Dr. Mayling Oey-Gardiner (Ketua Komisi Ilmu Sosial dalam Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia) dan M. Hasan Ansori, Ph.D. (Direktur Eksekutif, The Habibie Center).

Dalam sambutannya, Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo mengingatkan bahwa Indonesia, sebagai ketua ASEAN pada tahun 2023, memikul tanggung jawab besar untuk memastikan berbagai prioritas ASEAN dapat diutamakan. Indonesia berupaya menjadikan ASEAN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi global dengan tema “ASEAN Matters: Epicentrum of Growth.” Fokus utamanya adalah untuk memperkuat perdagangan intra-ASEAN, rantai pasok, dan investasi. Para wakil negara ASEAN didorong untuk mengoptimalkan inisiatif dan capaian dalam dua tahun terakhir guna mempersiapkan visi ASEAN pasca-2025. Tantangan utama yang dihadapi termasuk bagaimana ASEAN menghadapi kondisi darurat ekonomi, sikap terhadap gejala deglobalisasi, dan pengelolaan risiko untuk menjaga sentralitas ASEAN. Selain itu, ASEAN perlu mempertimbangkan pengaruh dalam geopolitik dan

geoekonomi yang telah bergeser dalam dekade terakhir. Melalui berbagai inisiatif, termasuk penghapusan tarif dan pengembangan kerangka investasi, Indonesia ingin mewujudkan ASEAN sebagai pusat ekonomi dunia. Namun, perdagangan intra-ASEAN masih stagnan, dan kehadiran Timor Leste sebagai calon anggota baru menambah tantangan integrasi pasar ASEAN yang semakin kompleks.

Setelah diskusi selesai, Prof. Mayling mengapresiasi berbagai capaian positif ASEAN yang telah disampaikan oleh Ir. Netty Muharni. Akan tetapi, Prof. Mayling juga setuju dengan narasumber lainnya yang menyatakan bahwa kesenjangan besar antara Timor Leste dan negara-negara ASEAN lainnya menjadi tantangan nyata. Oleh karena itu, pentingnya memanfaatkan momentum dengan mengembangkan kapasitas Sumber Daya Manusia dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah produksi di ASEAN.

Sebagai penutup, Dr. Mohammad Hasan Ansori percaya bahwa seminar hari ini penuh dengan informasi dan perdebatan, mencerminkan adanya optimisme dan pesimisme terkait berbagai isu dan tantangan yang dihadapi ASEAN. Salah satu isu utama yang dibahas adalah kesenjangan pertumbuhan ekonomi antar negara ASEAN, dengan contoh ekstrem seperti perbedaan besar antara Timor Leste dan Singapura. Selain itu, kesenjangan juga terjadi dalam negara-negara anggota ASEAN, seperti antara Jakarta dan luar Jakarta di Indonesia. Tantangan lainnya termasuk infrastruktur, pembangunan berkelanjutan, korupsi, dan modalitas yang diangkat oleh Ibu Netty. Seminar ini menekankan pentingnya kontribusi masyarakat sipil, khususnya Habibie Center, dalam memberikan masukan kebijakan ekonomi kepada pemerintah. Tujuannya adalah untuk membantu ASEAN menghadapi tantangan ini dan mendorong pertumbuhan yang lebih inklusif dan berkelanjutan di kawasan.

Prof. Dewi Fortuna Anwar
(Ketua Dewan Pengurus, The Habibie Center
dan Anggota Komisi Ilmu Sosial, Akademi Ilmu
Pengetahuan Indonesia)

Tema keketuaan Indonesia di ASEAN tahun 2023 adalah “*ASEAN Matters Epicentrum of Growth*”. “*ASEAN matters*” memiliki dua nuansa yang menegaskan bahwa ASEAN penting dan relevan. Sedangkan *epicentrum of growth* memiliki arti ASEAN sebagai pusat dari pertumbuhan. Jika seminar pertama fokus pada isu politik dan keamanan, khususnya isu geopolitik, Myanmar, sengketa Laut Cina Selatan, persaingan Amerika Serikat dan RRC dan sebagainya, seri kedua fokus kepada isu-isu yang terkait dengan pilar ASEAN *Economic Community*. Pada seri kedua, terdapat beberapa pertanyaan yang akan didiskusikan. Pertama, mengkaji sejauh mana capaian ASEAN *Economic Community* di dalam rangka mewujudkan visi ASEAN *Economic Community* 2025 dan rancangan visi yang pasca-2025. Kedua, penting untuk mengamati dampak positif atau negatif dari kerjasama ekonomi ASEAN, apakah perdagangan bebas benar-benar mendorong pertumbuhan atau malah menjadikan ASEAN kurang kompetitif. Ketiga, terdapat variasi signifikan di antara negara anggota ASEAN, mulai dari yang sangat kaya dan maju hingga yang masih termasuk dalam kategori negara kurang berkembang, yang menimbulkan potensi kesenjangan. ASEAN perlu mengatasi kesenjangan ini, terutama dengan bergabungnya negara baru seperti Timor Leste, dan juga memperhatikan kerjasama dengan pihak luar melalui perjanjian seperti ASEAN *China Free Trade* dan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP).

II. A. Capaian Implementasi AEC Blueprint 2025 dan Visi ASEAN Pasca-2025

Ir. Netty Muharni, MURP

(Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional dan Sub-Regional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI)

Ir. Netty membahas capaian, tantangan, dan penyusunan visi ASEAN 2045, yang sangat tepat waktu mengingat Indonesia adalah ketua ASEAN 2023 dan sedang menyusun visi ASEAN 2025. Beliau berharap mendapatkan masukan dari pakar untuk memproyeksikan kondisi ideal ASEAN ke depan berdasarkan modalitas yang ada saat ini. Sebagai Asisten Deputi Kerjasama Regional dan Subregional, Ir. Netty bertanggung jawab atas koordinasi Pilar Ekonomi ASEAN, dengan Menteri Koordinator Perekonomian sebagai ketua *ASEAN Economic Community Council*.

ASEAN sebagai organisasi *intergovernmental* bertujuan untuk menjaga stabilitas keamanan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. ASEAN merupakan hub penting untuk perdagangan global. Pada 2019, lebih dari 2,8 triliun USD perdagangan global melintasi kawasan ASEAN. Lalu, apakah ASEAN itu signifikan? Apakah ASEAN penting bagi kita? Berdasarkan kondisi makro, sejak didirikan pada tahun 1967 sampai data tahun 2021, ASEAN berada di lima besar ekonomi dunia setelah AS, Tiongkok, India, dan Jerman. GDP per kapita meningkat sekitar 4.200% dari 1967 sampai tahun 2021. Populasi meningkat sebesar 264%, dari 185 juta menjadi 670 juta, yang merupakan human capital bagi pertumbuhan ekonomi. Kemudian, investasi meningkat dari 3 miliar menjadi 168 miliar atau sekitar 5.400%. Total perdagangan meningkat dari 10 miliar menjadi hampir 2.600 miliar atau tumbuh sekitar 25.000%. Dari sisi pengguna internet untuk digitalisasi, saat didirikan belum ada, tetapi saat ini sekitar 61% penduduk

ASEAN adalah pengguna internet. Hal ini menunjukkan bagaimana transformasi ekonomi kawasan dibandingkan dengan saat berdiri di tahun 1967. Pertanyaannya, apakah transformasi dan kondisi saat ini adalah karena ASEAN atau karena transformasi unilateral dari masing-masing negara ASEAN? Jawabannya adalah kombinasi keduanya, karena tidak dapat dipungkiri bahwa negara-negara ASEAN saling belajar. ASEAN merupakan media pembelajaran bagi negara anggotanya dalam kerjasama, termasuk kerjasama perdagangan dan sebagainya. Jadi, secara keseluruhan, keberadaan ASEAN membantu negara-negara anggotanya meningkatkan daya saing.

ASEAN Economic Community Blueprint 2025 adalah panduan untuk pilar ekonomi selama sepuluh tahun terakhir. Dari tahun 2015 hingga 2022, pencapaian ASEAN telah mencapai 73% menuju integrasi ekonomi yang lebih mendalam. *Blueprint* ini mencakup lima pilar ekonomi dengan sekitar 22 badan sektor yang memiliki rencana aksi masing-masing, termasuk keuangan, perpajakan, pertanian, pariwisata, perdagangan, dan jasa. Selain itu, blueprint ini juga mencakup fasilitasi perdagangan dan akses pasar untuk perdagangan barang, jasa, investasi, konektivitas, digitalisasi, dan keberlanjutan.

Pada Mei 2023, KTT ASEAN ke-42 berlangsung di Labuan Bajo. *Chairman statement* mencakup komitmen ASEAN sebagai pusat pertumbuhan dengan fokus pada implementasi blueprint dan 16 prioritas di bidang ekonomi. Prioritas ini meliputi isu keamanan energi, keamanan pangan, transformasi digital, keamanan siber, serta kolaborasi antara sektor keuangan dan kesehatan pasca pandemi. Selain itu, dibahas juga upgrade A3, ratifikasi penuh RCEP, peran UMKM, serta isu keberlanjutan seperti ekonomi biru, ekonomi sirkular, dan netral karbon. Ekonomi kreatif, terutama didorong oleh Filipina, akan menjadi penggerak utama masa depan ASEAN.

Saat ini, ASEAN sedang menyelesaikan prioritas terkait keamanan pangan, dengan fokus pada penguatan keamanan pangan secara keseluruhan. Prioritas utama tahun ini adalah DEFA (*Digital Economic Framework Agreement*), sebuah kesepakatan kerangka kerja ekonomi digital di ASEAN. Indonesia berencana mempercepat negosiasi DEFA, dengan peluncuran dijadwalkan pada September dan tahap awal negosiasi dimulai pada akhir 2023. DEFA mencakup 11 elemen utama, yang diharapkan dapat disepakati bersama. Selain itu, selama masa keketuaan Indonesia, telah dirilis Taksonomi *Sustainable Finance* versi 2, mendorong adopsi Standar Harmonisasi ASEAN untuk Mendukung SDGs, dan memperkuat konsep Ekonomi Biru ASEAN. Ini merupakan beberapa dari banyak prioritas yang dihadapi ASEAN tahun ini.

Tema tahun ini menegaskan ASEAN sebagai pusat pertumbuhan. Indonesia berharap untuk menerbitkan Deklarasi Pemimpin ASEAN tentang ASEAN sebagai *Epicentrum of Growth*, yang akan memberikan panduan tentang bagaimana mencapai status sebagai pusat pertumbuhan. Pusat pertumbuhan ASEAN mencakup berbagai faktor permintaan seperti konsumsi pemerintah, rumah tangga, investasi, dan perdagangan internasional, sementara pertumbuhan terjadi melalui sektor-sektor yang memiliki dampak signifikan. Konsep *Epicentrum of Growth* membuka peluang untuk mengeksplorasi unsur-unsur kunci yang diperlukan dan sudah dirancang untuk ASEAN saat ini. Selain itu, setiap kepemimpinan ASEAN meninggalkan jejaknya, seperti penandatanganan *Bali Concord* yang pertama saat Indonesia memimpin, termasuk *Treaty of Amity and Cooperation* yang masih menjadi panduan dalam hubungan ASEAN dengan mitra di luar kawasan.

ASEAN mempunyai beragam modalitas yang dapat dimanfaatkan, termasuk demografi yang dinamis, kinerja ekonomi yang kuat, serta potensi perdagangan dan investasi yang besar. Fokus pada era digital dan peluang ekonomi hijau dan biru juga menjadi

kunci dalam mengembangkan potensi ekonomi kawasan. Namun, ASEAN juga dihadapkan pada tantangan-tantangan seperti ketegangan geopolitik dan ekonomi di Laut Cina Selatan, serta inkonsistensi kebijakan domestik di negara-negara ASEAN. Salah satu tantangan utama adalah stagnasi perdagangan intra-ASEAN, yang mungkin memiliki sisi positif tersendiri sebagai berkah terselubung. Hal ini mengindikasikan potensi besar ASEAN untuk meningkatkan perdagangan dengan mitra di luar kawasan, namun juga menekankan pentingnya kemandirian dalam pasokan di masa depan melalui peningkatan kerjasama internal. Walaupun demikian, usaha untuk meningkatkan perdagangan intra-ASEAN tetap krusial untuk mengoptimalkan potensi kawasan.

Di sisi lain, ASEAN menonjol dengan berbagai elemen kunci pertumbuhan, seperti konektivitas yang solid, lingkungan yang mendukung, sumber daya manusia yang berkualitas, serta inovasi teknologi dan akses pasar yang luas. Dengan memanfaatkan modalitas yang ada dan mengatasi tantangan yang dihadapi, ASEAN memiliki potensi besar untuk menjadi pusat pertumbuhan yang signifikan di kawasan maupun secara global.

Proyeksi menunjukkan bahwa ASEAN akan menjadi salah satu ekonomi terbesar di dunia, dengan 70% penduduknya diperkirakan menjadi bagian dari kelas menengah ke atas. Hal ini merupakan proyeksi kunci yang menjadi landasan bagi masa depan ASEAN. Saat ini, Indonesia unggul dalam modalitas demografi dan human capital di ASEAN. Di samping itu, pasar di ASEAN memiliki potensi besar dengan jumlah konsumen yang signifikan. Sebagai produsen, ASEAN memiliki keunggulan yang kuat untuk memaksimalkan potensi ini. Proyeksi terbaik menunjukkan bahwa pada tahun 2045, PDB ASEAN bisa meningkat hingga empat kali lipat dari kondisi saat ini. Kita juga memiliki keunggulan dalam konektivitas di ASEAN, yang mendukung pergerakan barang dan perdagangan.

ASEAN sebagai *epicentrum of growth* dirancang dengan tiga unsur utama: memperkuat ketahanan ASEAN terhadap guncangan masa depan, memanfaatkan penggerak pertumbuhan baru, dan melihat ke depan dengan perspektif yang inovatif. Ketiga unsur ini adalah elemen-elemen kunci yang diharapkan akan menjadikan ASEAN sebagai pusat pertumbuhan. Selain itu, ASEAN juga sedang mengembangkan visi paska tahun 2025. Proses ini melibatkan penyusunan core element tahun lalu, penyusunan draft visi tahun ini, dan akan melanjutkan dengan penyusunan dokumen pendukung tahun depan, dengan rencana peluncuran visi pada tahun 2025. Visi ini mencakup elemen-elemen inti yang bersifat action-oriented, sustainable, enterprising, bold, innovative, adaptable, nimble, resilient, inclusive, participatory, dan kolaboratif.

II. B. Kesenjangan Pembangunan Ekonomi di Kawasan ASEAN serta Tantangan Integrasi Timor Leste ke dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN

Dr. Zamroni Salim

(Peneliti Senior, The Habibie Center/Direktur, Pusat Penelitian Makro Ekonomi dan Keuangan, Badan Riset dan Inovasi (BRIN))

Dalam paparannya, Dr. Zamroni Salim membahas isu ketimpangan pembangunan ekonomi di ASEAN dan mengkaji posisi Timor Leste dalam potensi keanggotaan penuh ASEAN. Ditekankan bahwa pembangunan ekonomi harus diukur dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Data yang disajikan haruslah dapat dibandingkan antar negara dan meliputi rentang waktu yang cukup, misalnya 10-20 tahun, serta mencakup berbagai aspek ekonomi dan bersifat makro. Beberapa indikator yang diperhatikan termasuk GDP, akses terhadap sumber daya ekonomi, lapangan kerja, dan akses terhadap kebutuhan dasar seperti air bersih, listrik,

dan pendidikan. Analisis ini diharapkan dapat membantu dalam mengevaluasi ketimpangan pembangunan ekonomi di ASEAN dan merumuskan rekomendasi terkait potensi keanggotaan penuh Timor Leste di ASEAN.

Dalam analisis Dr. Zamroni, data PDB ASEAN dari tahun 2018 hingga proyeksi tahun 2028 digunakan untuk mengevaluasi ketimpangan pembangunan ekonomi di kawasan tersebut. Dari data tersebut, terlihat bahwa terdapat kelompok negara di ASEAN dengan perbedaan signifikan dalam PDB masing-masing. Indonesia menonjol sebagai negara terbesar dengan PDB sebesar USD 1,3 triliun pada tahun 2022, diikuti oleh Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Filipina, yang berada di tier kedua dengan PDB sekitar USD 400-500 miliar. Kemudian, terdapat kelompok negara lain seperti Kamboja, Laos, dan Myanmar, yang memiliki PDB yang lebih rendah. Namun, yang menarik adalah posisi Timor Leste dengan PDB sebesar USD 3,1 miliar. Angka ini terbilang masih jauh lebih rendah bahkan jika dibandingkan dengan Kamboja yang memiliki PDB sekitar USD 28 miliar. Hal ini mengindikasikan adanya ketimpangan yang signifikan dalam pembangunan ekonomi di ASEAN yang perlu mendapat tinjauan lebih lanjut.

Jika melihat angka pendapatan per kapita, terdapat ketimpangan yang signifikan di ASEAN. Singapura menduduki urutan tertinggi dengan PDB per kapita sekitar USD90.000, sementara Indonesia berada di sekitar USD5.000, dan Timor Leste sekitar USD2.700. Angka-angka ini akan dianalisis lebih lanjut untuk memahami faktor-faktor yang menyebabkan ketimpangan ini. Selain itu, kesenjangan dapat ditinjau menggunakan *Human Development Index* (HDI) yang terdiri dari tiga komponen utama: harapan hidup saat lahir, tahun sekolah, dan pendapatan per kapita. HDI memberikan gambaran menyeluruh tentang tingkat pembangunan ekonomi suatu negara yang memungkinkan perbandingan antar negara dengan mudah. Berdasarkan HDI, terdapat tiga kelompok utama: negara-negara

dengan HDI tinggi seperti Singapura, Brunei, Malaysia, dan Thailand, Indonesia berada di kategori menengah, dan negara-negara dengan HDI menengah ke bawah seperti Filipina, Laos, Kamboja, Myanmar, dan Timor Leste. Dari data pembangunan ini, beberapa negara mengalami peningkatan pembangunan, tetapi Timor Leste mengalami penurunan pada tahun 2017-2018 karena ekonominya turun di bawah 3%. Ini menunjukkan bahwa masih ada tantangan yang harus diatasi dalam upaya pembangunan ekonomi di Timor Leste.

Ketika berbicara tentang *ASEAN Economic Community* pada tahun 2025, penting untuk menyadari bahwa kesenjangan tersebut adalah realitas yang tercermin dari berbagai indikator sebelumnya. Terdapat pengelompokan ketimpangan di antara negara-negara ASEAN. Negara besar dengan populasi dan PDB yang besar, seperti Indonesia, memiliki PDB per kapita yang relatif kecil. Di sisi lain, negara kecil dengan populasi yang kecil, seperti Singapura, memiliki PDB per kapita tinggi karena produktivitas, teknologi, dan sektor tersier yang kuat. Selanjutnya, terdapat negara kecil dengan PDB dan penduduk yang kecil, serta sumber daya yang terbatas, seperti Kamboja, Laos, dan kemungkinan Timor Leste di masa depan. Kesenjangan ekonomi ASEAN dapat terpengaruh oleh ketimpangan ini. Stagnasi yang terjadi mungkin merupakan dampak langsung dari ketimpangan tersebut, terutama jika mempertimbangkan variasi dalam perdagangan intra-ASEAN. Misalnya, Kamboja memiliki tingkat perdagangan intra-ASEAN yang tinggi, sekitar 58,9%, sementara Vietnam memiliki tingkat yang lebih rendah, sekitar 9,9%, dan Timor Leste mendekati Indonesia dengan sekitar 20%.

Berkaitan dengan integrasi Timor Leste menjadi anggota ASEAN, penting untuk mempertimbangkan sudut pandang teori terlebih dahulu, terutama teori integrasi ekonomi yang dikemukakan oleh Jacob Viner pada tahun 1950. Viner menyoroti konsekuensi integrasi

yang disebut sebagai *Trade Creation*, yang dapat berdampak baik atau buruk. Meskipun kritik terhadap fokus Viner pada konsekuensi jangka pendek, hal ini dapat memperluas analisis dengan mempertimbangkan aspek konsumsi yang dibahas oleh Lipsey, Johnston, dan lainnya. Mereka menunjukkan bahwa meskipun bergabungnya negara baru dapat menyebabkan *Trade Creation* dan *Trade Diversion*, dampaknya tidak selalu merugikan karena dapat menguntungkan konsumen. Meskipun trade balance bisa menjadi negatif, konsumen masih dapat merasakan manfaatnya, sehingga konsumsi menjadi faktor penting untuk dampak positif. Namun, perlu diingat bahwa hanya mengandalkan konsumsi tidaklah cukup dalam jangka panjang, karena pendapatan per kapita juga harus dipertimbangkan. Meskipun dapat memberikan dampak positif dalam jangka pendek, kita harus mempertanyakan apakah hanya mengandalkan konsumsi adalah solusi yang berkelanjutan ketika negara baru bergabung dalam integrasi.

Ketika ASEAN mempertimbangkan penerimaan Timor Leste sebagai anggota baru, terdapat beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan. Pertama, negara yang berkontribusi positif biasanya memiliki ukuran PDB yang besar, pasar yang besar, dan sektor produksi yang kompetitif. Namun, dalam konteks Timor Leste, meskipun ukurannya mungkin tidak sebesar negara lain, potensi untuk menjadi kompetitif tetap ada, karena keanggotaannya dapat menciptakan *trade creation* di dalam ASEAN. Selanjutnya, faktor politik juga menjadi pertimbangan penting. Apakah negara tersebut memiliki peran utama dalam dinamika geopolitik regional? Seperti yang terjadi dengan posisi Ukraina dalam hubungannya dengan NATO, letak geografis suatu negara dapat menjadi faktor penentu dalam politik regional. Faktor keamanan, baik regional maupun global, juga perlu diperhitungkan karena dapat memengaruhi secara geografis keamanan di kawasan tersebut.

Timor Leste mulai ditinggalkan oleh beberapa negara tetangganya, termasuk Australia dan New Zealand. Namun, pertanyaan mendasar muncul: mengapa ASEAN harus mengundang Timor Leste? Dr. Zamroni menyoroti pentingnya letak geografisnya, yang membuat Timor Leste menjadi aset berharga bagi ASEAN, terutama karena Indonesia, sebagai anggota ASEAN, memiliki keterkaitan erat dengan negara tetangga dan saudara di Asia Tenggara. Ketika ASEAN membuka pintunya, perubahan signifikan dalam pertumbuhan ekonomi dapat terjadi, yang mungkin membutuhkan koreksi. Munculnya Timor Leste sebagai anggota baru akan memicu penyesuaian biaya, baik bagi negara-negara yang telah ada dalam ASEAN maupun bagi anggota baru itu sendiri. Tantangan ini, seperti yang diakui oleh Timor Leste sendiri melalui pernyataan Ramos Horta, menunjukkan kompleksitas dan kesulitan yang terlibat dalam proses bergabung dengan ASEAN. Sebagaimana yang diungkapkan Horta, *"It seems like the road to heaven is easier, closer, than to reach the gate of ASEAN,"* menyoroti kerumitan dalam proses bergabung dengan ASEAN.

Dr. Zamroni menggunakan *Criteria Based Roadmap* dalam menilai peluang dan tantangan keanggotaan Timor Leste di ASEAN. Berdasarkan prediksinya, beberapa faktor perlu dipertimbangkan oleh Timor Leste saat mempertimbangkan keanggotaan penuh. Pertama, kemampuan Timor Leste untuk memenuhi kewajiban anggota, terutama mengingat *ASEAN Chairmanship* yang berputar setiap tahun. Kedua, perlu dilakukan harmonisasi hukum, regulasi, dan dokumen perdagangan untuk menyamakan langkah dengan 10 negara ASEAN lainnya, dengan catatan bahwa proses harmonisasi serupa membutuhkan waktu lima hingga tujuh tahun bagi negara-negara CLMV (Cambodia, Laos, Myanmar, Vietnam). Ketiga, terdapat kewajiban kontribusi keuangan sekitar USD2,5 juta per tahun, serta isu fasilitasi perjalanan. Terakhir, ada juga pertimbangan mengenai biaya identitas ASEAN dan risiko geopolitik yang perlu dievaluasi, khususnya dalam konteks posisi Timor Leste secara geopolitik.

Sebagai catatan penutup, penting untuk menyadari bahwa diskusi mengenai kesenjangan pembangunan ekonomi adalah sesuatu yang kompleks dan mempengaruhi berbagai kelompok dengan dampak yang beragam, yang pada akhirnya dapat menghambat integrasi ekonomi di ASEAN. Meskipun pembicara sebelumnya menggambarkan hal ini dengan nada positif, Dr. Zamroni merasa lebih nyaman untuk menyebutnya sebagai kenyataan netral. Ketika melangkah menuju tahun 2025, masih terdapat ketidakpastian apakah ASEAN 10, bahkan dengan tambahan Timor Leste, akan mampu mencapai integrasi penuh. Selain itu, penambahan anggota baru juga membutuhkan pertimbangan politik, ekonomi, dan keamanan yang cermat. Hal ini menjadi pertimbangan kunci bagi negara-negara ASEAN 10 dalam merumuskan *ASEAN Criteria Based Roadmap*, termasuk dalam menentukan kapan Timor Leste dapat menjadi anggota penuh di ASEAN, apakah pada tahun 2023 atau di masa yang akan datang. Terakhir, ketika membahas penerimaan anggota penuh, masalah konsensus yang ditegaskan oleh Perdana Menteri Malaysia menjadi sangat penting, di mana setiap negara di ASEAN harus mencapai kesepakatan, termasuk dalam hal *non-interference*. Dan akhirnya, pertanyaan besar yang harus dijawab adalah, apakah Timor Leste mampu memenuhi *ASEAN Criteria Based Roadmap*?

II. C. *The Global Production Network: The Tale of ASEAN*

Dr. Fithra Faisal Hastiadi

(Direktur Eksekutif, Next Policy)

Dr. Fithra memulai presentasinya dengan berbagi pengalaman pribadi tentang peristiwa yang terjadi pada tahun 2011 saat masih bekerja di *Asia Development Bank* (ADB) Institute di Tokyo. Saat itu, dalam sebuah telekonferensi dengan Surin Pitsuwan, mereka membahas target perdagangan intra-regional ASEAN tahun 2015

yang ditetapkan dalam rangka *ASEAN Economic Community*, yang seharusnya mencapai 30% dari total perdagangan. Namun, sayangnya, target tersebut tidak tercapai, dan angka 30% tersebut sebenarnya masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan Uni Eropa. Pada kesempatan lain, saat menghadiri seminar sekitar tahun 2013/2014 di Chiang Mai, seorang pejabat Thailand menyatakan bahwa *“ASEAN alone is going nowhere.”* Hal ini mengindikasikan bahwa ASEAN tidak mengalami kemajuan yang signifikan dan tetap stagnan. Menyoroti sejarah dari tahun 1967 hingga saat ini, tujuan awal ASEAN lebih bersifat politis daripada ekonomis. Meskipun aspek ekonomi akhirnya menjadi penting, hasilnya tidak memuaskan. Berdasarkan pengalaman Dr. Fithra, ASEAN terlihat tidak berkembang, dan angka perdagangan intra-regional masih stagnan. Oleh karena itu, solusi ke depan seharusnya melampaui batas ASEAN dan tidak hanya fokus pada ASEAN saja. Jika berbicara tentang integrasi di Asia, maka perlu memperluas cakupannya ke seluruh wilayah Asia, bukan hanya ASEAN.

Pada tahun 2010, ADB menerbitkan buku penelitian berjudul *“Asia 2050”*, yang meramalkan bahwa integrasi paling cepat akan terjadi pada tahun 2050. Proses ini melibatkan integrasi ekonomi, keuangan, dan perdagangan, namun diprediksi sulit dicapai dalam waktu singkat karena ketimpangan yang telah dijelaskan sebelumnya oleh Dr. Zamroni dan Ibu Netty. Pada tahun 2011, Dr. Fithra menerbitkan buku penelitian *“ASEAN 2030”*, yang memperkirakan integrasi secepat mungkin pada tahun 2030, terutama dalam perdagangan. Namun, ketimpangan antar negara menjadi hambatan dalam mencapai integrasi ekonomi yang komprehensif, seperti yang dialami Uni Eropa pada tahun 1999. Meskipun Uni Eropa memiliki mata uang tunggal, masih ada masalah akibat ketimpangan. Namun, dalam konteks integrasi perdagangan, ketimpangan justru bisa menjadi pendorongnya, baik berdasarkan teori maupun bukti empiris. Maka dari itu, Dr. Fithra melihat bahwa ASEAN memiliki

peluang sebagai *regional hub* dengan melampaui batas ASEAN karena kemungkinan ASEAN sendiri tidak akan mencapai kemajuan signifikan dalam integrasi ekonomi.

Menurut Dr. Fithra, ASEAN, terutama Indonesia, memiliki peluang yang muncul akibat konflik antara Rusia dan Ukraina serta disrupsi geopolitik dalam rantai pasokan dan sebagainya. Saat ini, AS dan Uni Eropa sedang mencari alternatif untuk berinvestasi dan berbisnis, menjauh dari Tiongkok. Meskipun ada kecenderungan investasi dan bisnis kembali ke dalam negeri, hal ini tidaklah efisien. ASEAN, dengan posisi strategisnya yang dekat dengan berbagai negara, baik di sebelah kiri maupun kanan, memiliki potensi untuk menjadi titik konsolidasi bagi para pemain besar seperti Tiongkok, Jepang, dan Korea. Dalam acara *Northeast Asia Think Tank Working Group* di Dalian pada tahun 2017, dibahas mengenai ASEAN plus tiga, di mana ASEAN dianggap sebagai tempat konsolidasi yang lebih bermakna daripada jika dikelola oleh negara-negara besar tersebut. Hal ini terbukti dengan aktivitas *friend shoring* di mana Vietnam dan Thailand berhasil menarik perhatian, serta India menunjukkan minat terhadap aset yang ada di ASEAN. Oleh karena itu, ASEAN memiliki peluang untuk menjadi pusat pertumbuhan (*epicentrum of growth*) sebagaimana telah dibahas sebelumnya.

Dalam bukunya yang berjudul “*Trade Strategy in East Asia: From Regionalization to Regionalism*,” Dr. Fithra membahas tentang solusi di luar ASEAN, seperti Tiongkok, Jepang, Korea, dan pemain besar lainnya yang sebenarnya dapat menimbulkan efek bergulir (*spillover effect*) jika ASEAN melakukan integrasi dalam konteks jaringan produksi. Model *flying geese* dari Akamatsu menunjukkan bahwa apa yang terjadi di Tiongkok dan Korea Selatan sebagian besar merupakan hasil dari efek bergulir dari jaringan produksi Jepang. Mereka mampu membentuk jaringan produksi mereka sendiri karena efek bergulir dari Jepang. Harapannya, ketika ASEAN terintegrasi dengan ASEAN Plus Three

atau *ASEAN Plus Six*, pembicaraan tidak hanya terbatas pada ASEAN, tetapi juga melampaui batas ASEAN. Dengan demikian, ASEAN dapat merasakan efek bergulir tersebut. Hal ini merupakan peluang yang sifatnya 50-50, tergantung pada bagaimana ASEAN memanfaatkannya dan menyiapkan diri. Sebagaimana pepatah yang mengatakan “*utlubul ilmi walau bissiin*,” belajarlah bahkan sampai ke negeri Tiongkok. Tiongkok telah melakukan hal tersebut, dan ASEAN bisa mengikuti jejak Tiongkok tanpa harus menciptakan sesuatu yang baru. Hal yang sama berlaku untuk Korea Selatan, yang juga mendapatkan manfaat dari efek bergulir tersebut. Oleh karena itu, peran negara-negara Asia Timur Laut dalam buku ini adalah bagaimana cara memanfaatkan jaringan produksi untuk mendapatkan *spillover effect* bagi ASEAN.

Motivasi dan strategi dari Tiongkok, Jepang, dan Korea untuk masuk ke ASEAN dapat dijelaskan melalui dua konsep perdagangan intra-industri, yaitu *Horizontal Intra-industry Trade* dan *Vertical Intra-industry Trade*. Horizontal mengacu pada perdagangan antara industri yang sama dengan kualitas yang serupa, sedangkan vertikal berbeda. *Vertical Intra-industry Trade* terjadi akibat disparitas kualitas antara negara-negara ASEAN dan tiga negara besar tersebut. Jepang dan Korea, dalam total perdagangan mereka, memanfaatkan perbedaan kualitas untuk mendapatkan input produksi murah dari ASEAN, seperti tenaga kerja murah. Namun, Tiongkok memiliki hubungan yang lebih horizontal dalam total perdagangan.

Namun, jika kita mengagregasi data, dapat dilihat bahwa Tiongkok, Jepang, dan Korea fokus pada bagian-bagian dan komponen-komponen, yang merupakan bagian dari rantai produksi, yang mengindikasikan *Vertical Intra-industry Trade*. Meskipun Tiongkok telah maju ke tahap produksi yang lebih tinggi, seperti dalam teknologi 5G, mereka masih meninggalkan celah di pasar yang diisi oleh ASEAN. Ketika ASEAN bergabung dengan RCEP, negara-negara

ASEAN kemungkinan mengawali keterlibatan dalam sektor-sektor dengan nilai tambah yang rendah. Namun, hal ini mengingatkan kita bahwa bahkan Tiongkok dan Korea Selatan pernah memulai dari hal-hal kecil dan nilai tambah rendah, namun mereka mampu membangun jaringan produksi mereka sendiri. Oleh karena itu, penting bagi ASEAN untuk memahami dan mengeksplorasi peluang-peluang ini, serta mempersiapkan diri untuk memanfaatkannya dengan baik.

Dalam analisis *payoff matrix*, Dr. Fithra mengamati perilaku dari tiga negara: Tiongkok, Jepang, dan Korea, terhadap penetrasi mereka ke ASEAN. Misalnya, jika mereka tidak berkolaborasi satu sama lain, Tiongkok akan masuk sendiri, begitu juga dengan Jepang dan Korea. Ternyata, jika Tiongkok masuk sendiri dengan cara yang agresif, hal ini akan mengakibatkan dampak negatif pada keseluruhan ASEAN. Tiongkok yang masuk dengan cepat namun dangkal menghasilkan efek kesejahteraan negatif, yang sudah dibahas oleh banyak media dan literatur empiris, karena Tiongkok cenderung fokus pada keuntungan segera tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjangnya. Namun, jika Jepang dan Korea juga ikut serta, efek kesejahteraan menjadi positif. Jepang kemungkinan pertama kali memasuki ASEAN melalui Singapura, yang dianggap sebagai tes atau uji coba karena ukurannya yang kecil, sehingga risikonya juga kecil. Perilaku yang menarik terjadi saat Tiongkok bertindak agresif, Jepang akan mengikuti. Namun, jika Jepang juga ikut serta, efek kesejahteraan menjadi positif. Ini karena masing-masing negara mengharapkan yang lainnya juga ikut, dan pada akhirnya, terjadi keseimbangan umum di mana semua negara akhirnya bergabung dengan ASEAN karena ini menjadi titik temu yang menguntungkan bagi semua pihak.

Dalam bukunya yang berjudul *“Globalization, Productivity, and Production Networks in ASEAN”*, Dr. Fithra menyoroti posisi Indonesia dalam jaringan rantai produksi pada saat buku tersebut

diterbitkan pada tahun 2019. Pada waktu itu, Indonesia masih tertinggal dalam hal jaringan rantai produksi, bahkan di bawah Vietnam dalam beberapa aspek. Situasi ini terlihat pada semua sektor, di mana Indonesia masih kalah jika dibandingkan dengan negara lain di ASEAN. Namun, setelah pandemi COVID-19, situasinya berubah secara drastis. Faktor pertama adalah situasi di Tiongkok, di mana meskipun Tiongkok tumbuh ekonominya, mereka masih mengalami kekurangan dalam industri, sehingga mereka membutuhkan input produksi dari ASEAN, wilayah yang merupakan tetangga terdekat mereka. Hal ini memberikan peluang besar bagi Indonesia untuk mengambil langkah maju dalam jaringan rantai produksi. Di sisi lain, faktor relokasi juga berperan penting, di mana AS dan Uni Eropa, bahkan sebelum konflik antara Rusia dan Ukraina, mulai mencari resiliensi dalam rantai pasokan mereka, bukan hanya efisiensi. Ini berarti mereka mulai bergerak menjauh dari Tiongkok. Hal ini menciptakan peluang besar bagi Indonesia untuk menarik investasi dan memperluas jaringan rantai produksi. Bahkan, mantan Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe, mengungkapkan bahwa sebagian dari dana stimulus fiskal akan dialokasikan untuk memindahkan pabrik-pabrik dari Tiongkok. Pernyataan ini sangat menonjol mengingat kecenderungan Jepang untuk lebih bersikap diplomatis. Hal ini menunjukkan adanya perubahan yang signifikan dalam persepsi terhadap Tiongkok, serta meningkatnya minat untuk meninggalkan ketergantungan pada negara tersebut.

ASEAN, dengan karakteristik dan keunikan idiosinkratiknya, menjadi pilihan alami untuk dimanfaatkan dalam konteks ini. Indonesia memiliki potensi besar untuk memanfaatkan peluang ini, seperti dalam analogi balapan Formula 1, di mana kehadiran pandemi adalah “kejahatan yang perlu,” yang menghasilkan situasi di mana mobil yang sebelumnya terlalu jauh menjadi lebih dekat, memberikan peluang bagi Indonesia untuk menyalip dan

berpartisipasi lebih aktif dalam jaringan produksi regional. Data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menunjukkan peningkatan pesat dalam komitmen investasi, bahkan selama pandemi. Ini menandakan bahwa Indonesia berhasil memanfaatkan momentum yang ada. Namun, penting untuk tidak hanya meraih potensi momentum tersebut, tetapi juga mengubahnya menjadi tindakan konkret. Potensi pergeseran investasi yang terjadi bisa menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar potensi jika Indonesia mampu menjadikannya sebagai kenyataan. Langkah-langkah strategis dan kebijakan yang tepat akan memastikan bahwa negara ini benar-benar dapat mengoptimalkan peluang yang ada dan mencapai posisi yang lebih kuat dalam jaringan produksi regional ASEAN.

II. D. Prof. Dewi Fortuna Anwar
(Ketua Dewan Pengurus, The Habibie Center
dan Anggota Komisi Ilmu Sosial, Akademi Ilmu
Pengetahuan Indonesia)

Jika menilik pertumbuhan sejak tahun 1967, pencapaian ASEAN sungguh mengesankan, baik dari segi pertumbuhan penduduk maupun dalam hal perdagangan, investasi, dan lainnya. Namun, pertanyaan kunci yang muncul adalah, apakah ASEAN benar-benar penting? Apakah tanpa ASEAN, pertumbuhan tersebut akan sebesar ini atau tidak? Kemungkinan jawabannya adalah tidak. Mengapa demikian? Karena pertumbuhan ekonomi sangat tergantung pada kestabilan dan keamanan di satu kawasan. Jika tidak ada ASEAN, mungkin Indonesia masih berada dalam kondisi yang tidak stabil, di mana investasi lebih mungkin dialihkan ke angkatan bersenjata daripada ke sektor-sektor ekonomi yang produktif. Namun, hal yang menarik adalah bahwa pada awalnya, Indonesia adalah yang paling menolak *ASEAN Free Trade Agreement*. Hal ini karena dengan populasi yang merupakan 2/3 dari total populasi ASEAN waktu

itu, Indonesia khawatir bahwa akan menjadi sekadar pasar saja, sementara negara-negara seperti Thailand, yang memiliki ekonomi yang lebih kecil, mungkin akan menjadi lebih mendominasi dalam hal perdagangan.

Masuknya Timor Leste ke dalam ASEAN, seperti yang diungkapkan oleh Ramos Horta, diibaratkan sebagai tantangan yang lebih besar daripada mencapai surga. Namun, seperti yang dikatakan Prof. Dewi, Timor Leste sudah dianggap sebagai anggota ASEAN secara prinsip. Sekarang, fokus utamanya adalah seberapa cepat atau lambat Timor Leste dapat memenuhi roadmap yang telah ditetapkan, sementara saat ini mereka hanya berperan sebagai pengamat. Namun, tantangan besar menghadang dalam memenuhi kriteria-kriteria yang telah ditetapkan, termasuk kemampuan logistik, sumber daya manusia, birokrasi, institusi, proses meratifikasi undang-undang, dan penyesuaian ekonomi.

Singapura, yang cenderung berpikir secara rasional dalam hal ekonomi, sebelumnya termasuk yang paling enggan menerima Timor Leste. Namun, kebutuhan geopolitik dan geostrategis memaksa ASEAN untuk bertindak, terutama menghadapi potensi kebangkitan situasi perang dingin. Bagi Indonesia, kehadiran enklave di dalam wilayah Nusantara, yang pada tahun 1975 memaksa Indonesia untuk terlibat, menciptakan kekhawatiran akan potensi persaingan geopolitik di masa depan. Indonesia tidak ingin melihat kemungkinan pembentukan basis militer di Timor Leste, sehingga keanggotaan Timor Leste di ASEAN dianggap lebih baik dan lebih aman. Meskipun pertimbangan ini dipengaruhi oleh imperatif geopolitik dan keamanan, pertanyaan tetap berpusat pada rasionalitas ekonomi.

Potensi perdagangan intra-ASEAN terbatas karena adanya kesenjangan antar anggota, namun demikian, kecenderungan kompetitif daripada komplementer muncul karena ekspor barang-barang sumber daya primer. Untuk tumbuh, ASEAN perlu

dijadikan sebagai hub kerjasama dengan pihak luar, dimana kekuatan utamanya adalah inklusivitas dan tidak mengancam. Meskipun beberapa negara ASEAN memiliki aliansi militer dengan pihak luar seperti Filipina dengan Amerika Serikat dan Kamboja dengan Beijing, Indonesia menegaskan otonomi strategis dan sentralitasnya dalam hubungan luar. ASEAN menjadi fokus utama dalam hubungan luar dan diharapkan dapat menjadi alternatif investasi, khususnya setelah pandemi Covid-19 memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk mengejar ketertinggalan dan menumbuhkan resiliensi ekonomi.

II. E. Diskusi

Pertanyaan 1

- ASEAN dan Indonesia *is going nowhere*. Masih terjadi kesenjangan yang luar biasa dimana indeks Williamson untuk pendapatan perkapita antar daerah di Indonesia mencapai 0,8. Kesenjangan serupa juga terlihat di ASEAN. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan kesenjangan tersebut terjadi?
- Dimana letak episentrumnya, jika di ASEAN, Singapura adalah hub dari segalanya dan di Indonesia sendiri, Jakarta adalah hub dari segalanya?

Jawaban 1

Dr. Fithra Faisal Hastiadi

- Dr. Fithra menegaskan bahwa Indonesia tidak seharusnya dianggap sebagai negara yang tidak menuju ke arah manapun. Meskipun terkadang jalannya agak terengah-engah karena adanya ketidakseimbangan, namun solusinya dapat ditemukan dalam prinsip sila ke-5 dalam Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan ini harus tercermin

dalam nilai tambah yang diberikan oleh industri, dengan memperhatikan value to weight ratio yang seimbang. Untuk mewujudkan hal ini, Indonesia perlu mengembangkan industri untuk menciptakan ruang-ruang ekonomi yang lebih beragam. Meskipun peran Jakarta sebagai pusat layanan mirip dengan Singapura ditekankan, tantangan terkait ketidaksetaraan ekonomi harus diatasi. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga menjadi kunci, sehingga mereka dapat sesuai dengan kebutuhan industri. Dr. Fithra menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan memerlukan kontribusi industri minimal 25%, dan ekspor manufaktur minimal 9%. Selain itu, penting untuk keluar dari jebakan pendapatan menengah agar Indonesia dapat terus berkembang secara berkelanjutan. Dengan memperhatikan aspek-aspek ini dan mengambil langkah-langkah yang tepat, Indonesia dapat mengoptimalkan potensinya dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Dr. Zamroni Salim

- Dr. Zamroni tidak sejalan dengan pandangan bahwa Indonesia tidak memiliki arah. Dia melihat dua indikator utama yang menentukan produktivitas, yaitu seberapa cepat Indonesia dapat mencapai visi Indonesia 45 pada tahun 2045, dan apakah Indonesia atau negara lain yang akan menjadi pusat pertumbuhan ASEAN pada tahun 2045. Menurutnya, kedua indikator tersebut dapat dicapai melalui kebijakan yang mengarah pada knowledge-based economy, dengan fokus utama pada pengembangan sumber daya manusia dan teknologi. Dr. Zamroni percaya bahwa negara yang memiliki lingkungan investasi yang kondusif dan mendukung pencapaian knowledge-based economy akan mampu mengambil posisi

sentral dalam pertumbuhan ekonomi ASEAN. Identifikasi potensi negara-negara ASEAN yang memiliki peluang untuk menjadi sentral, seperti Singapura, Indonesia, dan Thailand, tergantung pada kebijakan yang diterapkan dan sektor-sektor dengan nilai tambah tinggi. Faktor kunci dalam kebijakan pertumbuhan ekonomi menurut Dr. Zamroni termasuk kebijakan pengembangan teknologi, penarikan investasi asing yang berkelanjutan, serta kebijakan yang memperhatikan pengembangan sumber daya manusia dan modal manusia. Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya jumlah penduduk sebagai dukungan untuk industrialisasi dalam jangka panjang.

Pertanyaan 2

- Apakah ASEAN, sebagaimana Indonesia, akan menjadi *middle power* yang menengahi *great power* dari Tiongkok dan US?
- Jika Indonesia ingin menjadi *respected middle power*, apakah ASEAN juga harus bisa menjadi wadah yang sama menjadi *great power* dari segala aspek?

Jawaban 2

Dr. Fithra Faisal Hastiadi

- Pada tahun 2018, dalam sebuah forum, ASEAN dianggap sebagai tempat konsolidasi, sementara Indonesia dipandang sebagai pemimpin *de facto* di dalamnya. Diskusi tersebut memusatkan perhatian pada usulan Tiongkok *terkait Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) dan ketegangan perdagangan dengan Amerika Serikat. Respons yang muncul menyoroti pentingnya ASEAN untuk tetap netral dan menjadi mediator di tengah-tengah konflik global. Prinsip “*The ASEAN way*” ditekankan sebagai kunci untuk menjaga keseimbangan

di kawasan tersebut. Tiongkok dipandang membutuhkan ASEAN karena fleksibilitasnya, meskipun ASEAN juga harus menjaga netralitasnya dan tidak terlibat dalam ketegangan antara Tiongkok dan Amerika Serikat. Pertanyaan muncul mengenai apakah ASEAN memiliki potensi untuk menjadi *middle power*, terutama dalam konteks ekonomi, namun jawaban atas pertanyaan ini tidak diberikan dalam diskusi tersebut.

Pertanyaan 3

- Bicara tentang ketetuaan Indonesia, sebenarnya bukan hal baru karena sebelumnya Indonesia telah empat kali menjadi ketua di ASEAN, yaitu pada tahun 1976, 1996, 2003, dan 2011. Jadi, ini merupakan kesempatan Indonesia untuk memainkan peran strategis dalam konteks ini. Jika mencermati apa yang disampaikan oleh pemerintah terkait cita-cita ASEAN sebagai *epicentrum of growth*, potensinya cukup besar. Bagaimanakah strategi ke depan untuk mewujudkan cita-cita tersebut?

Jawaban 3

Dr. Fithra Faisal Hastiadi

- Meskipun ada beberapa masalah yang muncul terkait pekerja imigran Indonesia di Jepang, secara keseluruhan, kerja sama imigrasi antara kedua negara ini tidak menghadapi tantangan yang signifikan. Evaluasi terhadap *ASEAN-China Free Trade Agreement* (FTA) mengungkapkan banyak kekurangan dan celah yang perlu diatasi. Di sisi lain, *ASEAN-Japan FTA* dinilai lebih solid dan komprehensif. Jepang juga mendukung *ASEAN Outlook on Indo-Pacific*, yang mencakup penerimaan terhadap peran Tiongkok dalam kawasan tersebut. Perbandingan antara dua FTA tersebut menunjukkan kemajuan yang lebih

baik dalam hubungan perdagangan dengan Jepang. Jepang, sebagai pendukung kuat ASEAN Outlook on Indo-Pacific, membuktikan komitmennya terhadap kawasan tersebut. Sementara Amerika Serikat memiliki *Indo-Pacific Economic Framework* yang tidak melibatkan Cina, ASEAN tetap dianggap sebagai elemen integral dalam kerangka kerja tersebut. Ini menegaskan posisi ASEAN sebagai tempat pertemuan yang penting dalam dinamika regional, terutama dalam hal kerjasama ekonomi dan geopolitik.

Jawaban 1 dan 3

Ir. Netty Muharni, MURP

- Untuk mengubah sebuah kawasan menjadi pusat pertumbuhan yang dinamis, aktivitas ekonomi yang kuat merupakan kuncinya. Ini melibatkan produksi dan manufaktur yang berkelanjutan, investasi berkualitas, dan integrasi yang kuat dengan rantai pasokan global. Konektivitas adalah kunci utama dalam mewujudkan visi ini. ASEAN telah merancang *Master Plan of ASEAN Connectivity* sebagai panduan untuk meningkatkan konektivitas infrastruktur, digital, regulasi, dan aspek lainnya yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif di seluruh kawasan. Namun, tantangan terbesar yang dihadapi ASEAN adalah memastikan bahwa konektivitas ini terus ditingkatkan, sehingga semua wilayah ASEAN dapat terhubung secara efektif. Hanya dengan meningkatkan konektivitas ini, ASEAN dapat benar-benar menjadi pusat pertumbuhan yang kuat dan berkelanjutan di tingkat regional dan global.
- Kemenko Perekonomian menegaskan pentingnya merumuskan konsep *“epicentrum of growth”* sebagai tema keketuaan Indonesia di ASEAN dengan mengidentifikasi tiga

elemen kunci. Pertama, kemampuan untuk mengatasi tekanan di masa depan, menghadapi tantangan yang mungkin timbul di wilayah ASEAN. Kedua, memiliki faktor-faktor pendorong pertumbuhan baru (*new growth drivers*) yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut. Dan ketiga, menjadi *future-proof* sesuai dengan *ASEAN Outlook on Indo-Pacific*, artinya mampu mengantisipasi dan menyesuaikan diri dengan perkembangan yang terjadi di kawasan Indo-Pasifik. Selain itu, pentingnya implementasi yang lebih kuat dari *ASEAN Outlook on Indo-Pacific* juga ditekankan, terutama dalam hal meningkatkan konektivitas dan kerjasama ekonomi di seluruh kawasan ASEAN. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memperkuat peran ASEAN sebagai pusat pertumbuhan, dengan fokus pada penguatan di kawasan dan pembangunan berkelanjutan di masa depan.

Pertanyaan 4

- Apakah mungkin ASEAN dapat memenuhi pangan dunia seperti komoditi jagung atau bahan pangan lain?

Jawaban 4

Dr. Fithra Faisal Hastiadi

- Dalam konteks ini, ASEAN menjadi semakin relevan sebagai potensi lumbung pangan global, asalkan mendapatkan investasi dan dukungan finansial yang cukup untuk membangun infrastruktur yang diperlukan. Diharapkan bahwa negara-negara yang menghadapi masalah kelangkaan pangan akan melihat nilai investasi di ASEAN, yang berpotensi untuk menciptakan sumber daya pangan yang berlimpah, membuka peluang lapangan kerja baru, dan mendorong investasi yang berkelanjutan di sektor pertanian dan pangan.

Pertanyaan 5

- Bagaimana menyikapi *Belt and Road Initiative* (BRI) di ASEAN? Melihat kenyataan dari Laos dan proyek *China-Laos Railway*, ditemukan bahwa ada deviasi yang muncul dari praktik di lapangan dengan identitas yang ditawarkan Tiongkok melalui BRI. Sehingga keuntungan akan lebih banyak dirasakan Tiongkok di mana Laos hanya dimanfaatkan untuk kepentingan strategis geopolitik.

Follow up pertanyaan dari Moderator

- Apakah memang tujuannya untuk menguasai satu kawasan, misalnya?

Jawaban 5

Dr. Fithra Faisal Hastiadi

- Dalam konteks utang bilateral, terdapat dua faktor penting yang perlu diperhatikan, yaitu pemberi pinjaman (donor) dan peminjam (debtor). Penting untuk diingat bahwa tidak hanya Tiongkok yang bertanggung jawab atas dinamika utang ini, tetapi kedua pihak memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing. Secara ideal, dalam konteks ekonomi, baik pemberi pinjaman maupun peminjam seharusnya mendapat manfaat dari transaksi tersebut, dan seharusnya ada kesepakatan yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Walaupun kadang terdapat pembahasan geopolitik yang terlibat, namun dengan negosiasi yang baik mengenai syarat dan kondisi pinjaman, kerjasama semacam itu bisa berjalan dengan lancar. Pendekatan yang dilakukan oleh Tiongkok cenderung lebih berorientasi pada diplomasi dan pengaruh yang lebih lunak daripada tindakan agresif seperti yang dilakukan oleh negara-negara seperti Rusia atau Amerika Serikat.

- Dalam konteks regionalisme, meskipun Tiongkok mungkin memiliki keinginan untuk memperluas pengaruhnya, mereka juga menyadari bahwa tindakan yang terlalu mencolok bisa memicu reaksi negatif dari negara-negara lain. Meskipun ada kemungkinan bahwa Tiongkok mencoba memanfaatkan atau mempengaruhi ASEAN sesuai kepentingannya, namun hubungan yang saling menguntungkan antara ASEAN dan Tiongkok adalah hal yang wajar dalam dunia geopolitik.

III

ASEAN Concord IV: Meninjau Tonggak Capaian Keketuaan Indonesia di ASEAN

Indonesia merampungkan keketuaannya di ASEAN pada tahun 2023 dengan berbagai capaian, termasuk konsensus terhadap dokumen *ASEAN Concord IV*. Dokumen tersebut disusun atas usul Indonesia dan ditujukan sebagai basis dari Visi Masyarakat ASEAN 2045 yang akan diformulasikan hingga 2025. Selaras dengan slogan dari keketuaan Indonesia, *ASEAN Concord IV* memiliki tiga komponen: *ASEAN Matters*, *Epicentrum of Growth*, dan implementasi terhadap *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific* (AOIP).²⁰

Komponen *ASEAN Matters* memuat berbagai poin yang ditujukan untuk mempertahankan relevansi dan persatuan ASEAN dalam mempertahankan stabilitas kawasan, terutama di tengah berbagai ancaman transnasional dan hadirnya sengketa Laut Cina Selatan. Kemudian, di dalam komponen *Epicentrum of Growth*, tertuang berbagai komitmen untuk meningkatkan integrasi kawasan dan upaya kolektif dalam mewujudkan berbagai tujuan kolektif dan mengantisipasi potensi instabilitas dalam berbagai sektor. Terakhir, komponen implementasi AOIP menghadirkan berbagai komitmen yang ditujukan untuk menjamin bahwa ASEAN tetap menjadi pihak utama yang menentukan arsitektur ekonomi dan keamanan di Indo-Pasifik.²¹

²⁰ ASEAN, *JAKARTA DECLARATION ON ASEAN MATTERS: EPICENTRUM OF GROWTH (ASEAN CONCORD IV)*, (Jakarta, 2023), <https://asean.org/wp-content/uploads/2023/09/DECLARATION-OF-ASEAN-CONCORD-IV.pdf>

²¹ Ibid.

Hadirnya *ASEAN Concord IV* menjawab ekspektasi berbagai pengamat terhadap pencapaian kunci Indonesia sebagai ketua ASEAN, mengingat rekam jejak Indonesia dalam menutup keketuaan di ASEAN dengan mengusulkan berbagai dokumen kunci, yakni *Bali Concord I, II, dan III*. Dokumen-dokumen *Bali Concord* tersebut memiliki nilai strategis terhadap perkembangan institusional ASEAN; hal ini terutama berlaku untuk *Bali Concord I dan II*. Dalam hal ini, *Bali Concord I* menjadi dokumen yang meletakkan berbagai prinsip dasar yang melandasi kerja sama ASEAN, terutama dengan keputusan untuk menandatangani *Treaty of Amity and Cooperation* (TAC) yang memuat berbagai norma khas ASEAN. Sementara itu, *Bali Concord II* melandasi upaya integrasi kawasan ASEAN dengan menyetujui terbentuknya Komunitas ASEAN dalam tiga pilar: keamanan,²² ekonomi, dan sosial-budaya. Terakhir, meskipun tidak memiliki nilai strategis yang setara, *Bali Concord III* memuat komitmen ASEAN dalam merespons berbagai tantangan global sebagai sebuah kolektivitas. Dengan demikian, keketuaan Indonesia di ASEAN pada tahun 2023 turut diiringi dengan ekspektasi tinggi untuk menerbitkan dokumen serupa.

Sebelum *ASEAN Concord IV* disetujui, terdapat berbagai ekspektasi yang disuarakan oleh pengamat, terutama terkait dengan kontribusi luaran tersebut dalam menjawab berbagai kritik terhadap kapasitas institusional ASEAN dalam menghadapi berbagai isu strategis di kawasan. Dalam hal ini, upaya untuk menguatkan kapasitas dan efektivitas institusional ASEAN menjadi salah satu agenda yang dikedepankan oleh *High-Level Task Force on ASEAN Community's Post-2025 Vision* (HLTF-ACV).²³ Dengan demikian, capaian kunci

²² Pilar ini kini mengalami rekonseptualisasi menjadi pilar politik-keamanan. Lihat: Jürgen Rüland, *The Indonesian Way ASEAN, Europeanization, and Foreign Policy Debates in a New Democracy*, (Stanford University Press, 2018).

²³ "Indonesia Urges Strengthening of ASEAN Institutional Capacity and Effectiveness," *Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia*, 29 April 2023, <https://kemlu.go.id/portal/en/read/4653/berita/indonesia-urges-strengthening-of-asean-institutional-capacity-and-effectiveness>

dari keketuaan Indonesia di ASEAN diharapkan dapat memfasilitasi langkah signifikan dalam meningkatkan kapasitas institusional ASEAN. Selain itu, berbagai proposal serupa pun telah disampaikan oleh berbagai akademisi di kawasan, seperti usulan untuk mengkaji ulang Piagam ASEAN²⁴ atau memperkuat posisi Sekretariat ASEAN.²⁵

Selain itu, upaya implementasi AOIP pun turut menghadirkan berbagai ekspektasi, terutama berkaitan dengan kemampuan AOIP dalam menjamin bahwa ASEAN dapat tetap menjadi pihak yang menentukan dinamika kawasan dan memiliki posisi sentral di Indo-Pasifik. Sebelum *ASEAN Indo-Pacific Forum* (AIPF) diumumkan, Indonesia telah diberitakan akan mengadakan *Indo-Pacific Infrastructure Forum* pada masa keketuaannya di ASEAN.²⁶ Rencana ini mempertegas pandangan Indonesia untuk mengeliminasi konteks rivalitas geopolitik yang kerap diasosiasikan dengan konstruksi Indo-Pasifik.

Diskusi seri III ditujukan untuk mengevaluasi *ASEAN Concord IV* sebagai tonggak capaian dari keketuaan Indonesia di ASEAN pada tahun 2023. Diskusi ini dipimpin oleh Prof. Dr. Dewi Fortuna Anwar

²⁴ Sebagai contoh, lihat: Singapore Institute of International Affairs, "REVIEWING THE ASEAN CHARTER: AN OPPORTUNITY TO REFORM ASEAN PROCESSES," *Policy Brief* (September 2014), <http://www.siiionline.org/wp-content/uploads/2016/10/2014-10-Policy-Brief-Reviewing-the-ASEAN-Charter-An-Opportunity-to-Reform-ASEAN-Processes.pdf>; Andrew W. Mantong & Evan A. Laksmana, "Myanmar crisis highlights need to revamp ASEAN Charter," *The Jakarta Post*, 10 Maret 2021, <https://www.thejakartapost.com/paper/2021/03/09/myanmar-crisis-highlights-need-to-revamp-asean-charter.html>

²⁵ Rekomendasi ini telah disampaikan oleh berbagai pengamat sejak beberapa tahun yang lalu. Sebagai contoh, lihat: Deepak Nair, "A Strong Secretariat, a Strong ASEAN? A Re-evaluation," *Perspective* (ISEAS - Yusof Ishak Institute, 19 February 2016), https://www.iseas.edu.sg/wp-content/uploads/2017/02/ISEAS_Perspective_2016_8.pdf; Chin Kin Wah, "ASEAN INSTITUTION BUILDING," in Sharon Siddique & Sree Kumar (eds.), *The 2nd ASEAN Reader* (ISEAS Publishing, 2003).

²⁶ Yericia Lai, "US, Indonesia agree to deepen Indo-Pacific cooperation," *The Jakarta Post*, 15 November 2022, <https://www.thejakartapost.com/world/2022/11/14/us-indonesia-agree-to-deepen-indo-pacific-cooperation.html>

(Ketua Dewan Pengurus dari The Habibie Center dan Anggota Komisi Ilmu Sosial dalam Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia) sebagai moderator. Kemudian, diskusi ini menghadirkan Marina Ika Sari, M.Si (Han) (Peneliti, The Habibie Center), Prof. Dr. Djisman S. Simandjuntak (Rektor, Universitas Prasetya Mulya), dan Moch. Faisal Karim, Ph.D. (Dosen Senior Hubungan Internasional, Universitas Islam Indonesia Internasional) sebagai pembicara. Diskusi ini dibuka oleh kata sambutan dari Prof. Dr. Mayling Oey-Gardiner (Ketua Komisi Ilmu Sosial dalam Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia) dan ditutup oleh M. Hasan Ansori, Ph.D. (Direktur Eksekutif The Habibie Center).

Prof. Dr. Mayling Oey Gardiner menyampaikan sambutannya dengan mengucapkan terima kasih kepada para narasumber, tim dari KIS AIPI dan The Habibie Center, dan para peserta yang hadir secara langsung maupun virtual. Rangkaian seminar terakhir ini bertujuan untuk (1) mendiskusikan capaian dan tantangan yang dihadapi Indonesia dalam bidang politik dan keamanan regional sebagai Ketua ASEAN 2023; (2) menganalisa kerja sama ekonomi ASEAN dalam skema Epicentrum of Growth dan capaian priority economic deliverables; dan (3) memahami signifikansi inisiatif Indonesia dalam mengarusutamakan dan mengimplementasikan AOIP.

Presiden Indonesia, Joko Widodo, menerima estafet keketuaan ASEAN dari Perdana Menteri Kamboja Hun Sen pada acara penutupan KTT ASEAN ke-40 dan 41 yang berlangsung di Phnom Penh pada 13 November 2022. Dengan penyerahan ini, Indonesia secara resmi menjadi Ketua ASEAN untuk tahun 2023. Selama menjabat, Indonesia telah berhasil menyelenggarakan KTT ASEAN ke-43 pada tanggal 5-7 September 2023 di Jakarta, melanjutkan KTT ASEAN ke-42 yang sebelumnya dilaksanakan di Labuan Bajo pada Mei 2023. Adapun pencapaian penting dari keketuaan Indonesia ialah tercapainya deklarasi ASEAN Concord IV dengan konsensus

yang memuat butir mengenai perubahan dan perkembangan berarti dalam ASEAN, yaitu menuju kawasan yang damai dan makmur. ASEAN Concord IV sejalan dengan berbagai agenda yang dipromosikan Indonesia, terutama dalam menerjemahkan slogan ASEAN Matters, Epicentrum of Growth, yang menjadi program aksi selama Indonesia menjabat.

III. A. Tantangan dan Capaian Keketuaan Indonesia di ASEAN tahun 2023 dalam Bidang Politik dan Keamanan

Marina Ika Sari, M.Si (Han)

(Peneliti, *ASEAN Studies Program*, The Habibie Center)

Marina Ika Sari, M.Si (Han) mewakili tim peneliti dari *ASEAN Studies Program*, The Habibie Center, memaparkan hasil observasi tim mengenai “Tantangan dan Capaian Keketuaan Indonesia di ASEAN tahun 2023 dalam Bidang Politik dan Keamanan”. Pemaparan dibagi ke dalam dua bagian, yaitu mengenai tantangan regional dan global yang dihadapi Indonesia dan capaian utama yang berhasil dilakukan oleh Indonesia selama menjabat sebagai Ketua ASEAN pada tahun 2023.

Berbicara mengenai tantangan regional, terdapat dua isu yang masih menjadi pekerjaan rumah bagi ASEAN hingga saat seminar dilaksanakan, yaitu krisis Myanmar dan sengketa Laut Cina Selatan. Terkait dengan krisis Myanmar, sejak kudeta militer yang dilakukan oleh junta militer pada awal tahun 2021, krisis politik ini sudah berkembang menjadi krisis kemanusiaan. Per Juni 2023, dampak dari krisis tersebut antara lain lebih dari 6.000 orang meninggal, 2.300 orang telah ditangkap oleh militer, lebih dari 1,5 juta warga Myanmar mengungsi, serta berbagai infrastruktur seperti rumah sakit, sekolah, dan rumah-rumah warga dibakar oleh pihak militer.

Sejak awal masa keketuaan ASEAN, Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan bahwa krisis Myanmar tidak dapat diselesaikan dalam kurun satu tahun kepemimpinan Indonesia. Indonesia melakukan pendekatan “*quiet diplomacy*” dalam menangani krisis Myanmar. Terdapat beberapa hal yang dilakukan Indonesia, salah satu di antaranya adalah mendirikan Kantor Utusan Khusus ASEAN untuk Myanmar yang bertugas untuk memfasilitasi pertemuan-pertemuan antara berbagai pemangku kepentingan di Myanmar. Berdasarkan data yang dirilis oleh Kemlu per November 2023, Indonesia telah melakukan 180 pertemuan dengan berbagai pemangku kepentingan di Myanmar (kelompok etnis bersenjata, *National Unity Government*, dan lain-lain), kecuali dengan junta militer karena mereka tidak bersedia melakukan dialog. Kementerian Luar Negeri Indonesia menyatakan bahwa jumlah pertemuan tersebut merupakan kontak dengan frekuensi terbanyak dan paling komprehensif yang pernah dilakukan oleh ketua ASEAN.

Kedua, di bawah keketuaan Indonesia, ASEAN juga melakukan mekanisme Troika untuk memastikan kesinambungan langkah-langkah yang dilakukan antara ketua ASEAN saat ini, sebelumnya, dan berikutnya. Ketiga, mempertimbangkan situasi yang tidak kondusif di Myanmar, ASEAN memutuskan bahwa Myanmar tidak akan menjadi ketua ASEAN pada tahun 2026. Dengan demikian, Filipina akan menggantikan Myanmar menjadi ketua ASEAN pada tahun tersebut.

Selanjutnya, terkait dengan isu sengketa Laut Cina Selatan, ASEAN dan Tiongkok masih melakukan perundingan mengenai CoC sampai seminar ini diselenggarakan. Di bawah keketuaan Indonesia, ASEAN berupaya untuk mempercepat negosiasi perundingan CoC. Misalnya, pada bulan Maret 2023, Indonesia menjadi tuan rumah untuk negosiasi CoC pada tahap pembacaan kedua dokumen CoC. Selain menyelesaikan draf dalam pembacaan kedua ini, Indonesia

juga menginisiasi adanya pedoman yang berfungsi untuk menjadi pedoman praktis agar nantinya CoC dapat digunakan secara efektif dan dapat ditindaklanjuti. Target negosiasi ini akan diselesaikan dalam tiga tahun hingga tahun 2026.

Satu minggu sebelum KTT ASEAN ke-43 dilaksanakan atau pada tanggal 28 Agustus 2023, pemerintah Tiongkok melalui Kementerian Sumber Daya Alam merilis peta standar Tiongkok edisi 2023. Dalam peta tersebut, Tiongkok mengklaim wilayah yang bersinggungan dengan beberapa wilayah negara-negara ASEAN dan Taiwan. Melalui peta tersebut, Tiongkok juga memperluas klaimnya dari *nine-dash line* menjadi *ten-dash line*. Akibatnya, beberapa pihak seperti Malaysia, Filipina, Vietnam, India, dan Taiwan menentang klaim Tiongkok tersebut.

Beralih ke tantangan global, terdapat dua tantangan global yang patut menjadi perhatian, yaitu pemulihan ekonomi pasca COVID-19 serta rivalitas antara AS dan Tiongkok. Pada masa pandemi COVID-19, negara-negara menerapkan situasi darurat yang mengakibatkan pembatasan mobilisasi manusia dan barang. Akibatnya, rantai suplai menjadi terganggu, yang berdampak pada perlambatan ekonomi. Selanjutnya, rivalitas AS dan Tiongkok dapat diobservasi dari tiga elemen; pertama, melalui keterkaitannya dengan isu geopolitik seperti sengketa Laut Cina Selatan dan Selat Taiwan yang menjadi titik panas di kawasan Indo-Pasifik. Kedua, pembentukan aliansi minilateral oleh AS melalui AUKUS dan Quad untuk membendung pengaruh Tiongkok. Terakhir, strategi konektivitas yang digagas Tiongkok melalui inisiatif ekonomi dan pembangunan yaitu *Belt Road Initiative (BRI)*.

Dampak dari kompetisi antara AS dan Tiongkok berpotensi untuk mendisrupsi kesatuan di antara negara anggota ASEAN. Secara bilateral, beberapa negara anggota ASEAN seperti Laos, Vietnam, Myanmar, dan Kamboja cenderung berhubungan lebih dekat

dengan Tiongkok. Sementara itu, beberapa anggota ASEAN lainnya seperti Filipina dan Singapura cenderung lebih dekat dengan AS. Terakhir, Indonesia dan Malaysia cenderung menunjukkan sikap netral. Dengan adanya tarik menarik kepentingan di antara *major powers* di kawasan, proses pembuatan keputusan di ASEAN dapat memengaruhi proses pembentukan konsensus. Selain itu, rivalitas antara AS dan Tiongkok juga dapat berpotensi meningkatkan tensi di kawasan, seperti yang terlihat dari pengerahan kekuatan militer kedua negara di wilayah Laut Cina Selatan.

Selama satu tahun menjabat, dengan tema yang diusung—“*ASEAN Matters: Epicentrum of Growth*”—keketuaan Indonesia tidak terlepas dari kritik. Pertama, terdapat kritik terhadap efektivitas ASEAN, terutama dalam proses pengambilan keputusan dalam kondisi krisis. Kedua, meningkatkan relevansi ASEAN sampai level masyarakat akar rumput. Sepanjang sejarahnya, ASEAN dipandang sebagai organisasi yang berporos pada pemerintah sehingga terkesan sebagai organisasi elit. Oleh karena itu, tim peneliti menilai bahwa kemampuan ASEAN dalam memberikan manfaat sampai ke level masyarakat akar rumput perlu dicermati. Selain itu, ASEAN perlu juga menakar upaya yang perlu diterapkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kehadiran ASEAN. Terakhir, sentralitas ASEAN pun diuji dalam menghadapi rivalitas AS dan Tiongkok di kawasan.

Selanjutnya, tim peneliti The Habibie Center merangkum tiga capaian utama dari keketuaan Indonesia di ASEAN pada tahun 2023. Capaian pertama adalah keberhasilan dalam menginisiasi *ASEAN Concord IV* dengan tiga elemen yang mencerminkan tema keketuaan Indonesia, yaitu *ASEAN Matters, Epicentrum of Growth*, dan implementasi dari AOIP. *ASEAN Concord IV* menjadi landasan atau pondasi dalam pembentukan *ASEAN Community Vision 2045* yang akan diresmikan pada tahun 2025. Berdasarkan rekam jejak keketuaan Indonesia di ASEAN, Indonesia selalu menjadi inisiator

terhadap berbagai dokumen kunci yang mengonseptualisasi atau mendefinisikan ulang peran ASEAN, seperti dalam pembentukan Deklarasi *Bali Concord I, II, dan III*.

Kedua, untuk menerjemahkan implementasi AOIP, Indonesia menjadi tuan rumah dalam penyelenggaraan *ASEAN Indo-Pacific Forum* (AIPF) yang merupakan salah satu acara utama dari Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-43. Fokus utama AIPF terletak pada bidang ekonomi, yang mencakup: (1) infrastruktur hijau dan rantai pasokan yang tangguh; (2) pembiayaan berkelanjutan dan inovatif; dan (3) transformasi digital inklusif dan ekonomi kreatif. Selain itu, Indonesia juga memperluas kerja sama ASEAN dengan *Indian Ocean Rim Association* (IORA) dan *Pacific Island Forum* (PIF) di berbagai bidang, seperti maritim, konektivitas, *Sustainable Development Goals* (SDGs), ekonomi biru, dan ekonomi hijau. Capaian ekonomi ASEAN lainnya yang perlu menjadi sorotan adalah inisiasi negosiasi *Digital Economy Framework Agreement* (DEFA) yang ditargetkan selesai pada 2025. Melalui DEFA, ASEAN berupaya untuk meningkatkan kapasitas ekonomi tiap negara ASEAN supaya lebih berdaya saing secara global.

Ketiga, terkait dengan penguatan kapasitas institusional ASEAN, ASEAN mengubah penamaan Sekretariat ASEAN menjadi Markas ASEAN (*ASEAN Headquarter*). Dengan upaya penguatan institusi tersebut, perlu dicermati apakah ASEAN dapat menjadi lebih efektif dan efisien dalam proses pengambilan keputusan di masa depan, terutama saat kondisi krisis. Kemudian, dalam pengimplementasian AOIP, pendekatan yang digunakan ASEAN bersifat inklusif; ASEAN terbuka dalam menjalin kerja sama dengan pihak manapun. Hal ini dapat digunakan untuk mengurangi tensi geopolitik di kawasan. Penyelenggaraan AIPF merupakan salah satu bentuk konkret dari implementasi AOIP. Namun, karena fokusnya lebih ke ranah ekonomi, yang menjadi pekerjaan rumah selanjutnya adalah implementasi AOIP di bidang politik-keamanan,

terutama dalam menangani isu-isu yang sensitif. Dalam pertemuan ASEAN Defense Ministers' Meeting (ADMM) lalu, negara-negara ASEAN merumuskan *concept paper* terkait implementasi AOIP dari perspektif pertahanan. Dokumen tersebut diharapkan dapat segera dirilis sehingga implementasi AOIP bersifat komprehensif dan mencakup semua bidang.

III. B. *To be Science-Driven or Not to be:* *Regional Neo-Colbertism*

**Prof. Dr. Djisman S. Simandjuntak
(Rektor, Universitas Prasetya Mulya)**

Prof. Dr. Djisman S. Simandjuntak memulai paparannya dengan menekankan bahwa ASEAN tetap penting di tengah kritik terhadap proses yang terjadi di dalamnya. ASEAN digunakan oleh negara-negara anggotanya sebagai jembatan dan arena pelatihan untuk meraih keunggulan kompetitif di tingkat global. Secara keseluruhan, kinerja dan pertumbuhan ekonomi di ASEAN tampak membaik pasca pandemi. Pada tahun ini dan tahun depan, ASEAN diproyeksikan akan tumbuh lebih baik dibandingkan kawasan lain di dunia.

Dari segi kompleksitas ekonomi, negara-negara ASEAN menduduki peringkat yang jauh berbeda antara satu dengan yang lainnya. Kemajuan ekonomi diukur dari kompleksitas perdagangan, teknologi, dan riset. Jika dilihat dari kacamata ini, Singapura merupakan salah satu negara dengan kompleksitas tertinggi di dunia dari sisi perdagangan, teknologi, dan riset. Sementara itu, Malaysia dan Thailand dinilai cukup kompleks. Vietnam dan Filipina tengah melaju dengan cepat dalam beberapa tahun terakhir karena sudah menjadi pemain yang cukup penting dalam perdagangan dan industri semikonduktor. Pada saat ini, Indonesia masih berada di atas Vietnam dari segi kompleksitas, tetapi cenderung statis karena Indonesia tertinggal dari sisi kompleksitas teknologi dan

riset. Struktur kompleksitas di ASEAN menjanjikan perdagangan yang sangat menarik. Semakin tinggi kompleksitas ekonomi suatu kawasan, semakin besar peluang untuk memperluas perdagangan maupun inovasi.

Di sisi lain, ASEAN mempunyai masalah terkait dengan konektivitas intra-ASEAN yang cenderung semakin berkurang dan digantikan oleh konektivitas intra-Asia Timur. Nilai perdagangan intra-ASEAN melemah kurang dari 25%. Sebelumnya, Malaysia, Singapura, dan Thailand dinilai sangat kuat dalam perdagangan intra-ASEAN. Namun, saat ini, ketiga negara tersebut mengalami pengurangan dalam perdagangan intra-ASEAN di bidang industri. Negara-negara ASEAN menjadi lebih erat konektivitasnya dengan Asia Timur seperti Tiongkok, Jepang, dan Korea. Tiongkok saat ini menjadi mitra dagang terbesar bagi Indonesia dan kebanyakan negara-negara ASEAN.

Prof. Djisman menggarisbawahi bahwa masyarakat perlu terus menjamin bahwa ASEAN masuk ke dalam agenda kebijakan luar negeri Indonesia untuk memastikan bahwa ASEAN tetap relevan. Hal ini dapat membantu negara-negara anggotanya untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan, lanskap, dan ekosistem baru. Parameter terpenting di dalam ekosistem yang baru adalah perubahan teknologi, seperti teknologi kosmik (semikonduktor, manufaktur 3D, dan hal-hal yang berhubungan dengan internet), teknologi genetik (pengeditan genom untuk pertanian, peternakan, dan kesehatan manusia), dan sinaptik. Teknologi-teknologi tersebut harus bisa dikuasai agar bisa bersaing secara global dan tidak tertinggal dalam kerja sama internasional.

Dari segi populasi, ASEAN akan tetap menjadi organisasi kawasan yang penting, mengingat ASEAN memiliki jumlah populasi yang terlalu besar untuk diabaikan. Negara-negara seperti AS, Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan tidak akan mengabaikan ASEAN, walaupun negara-negara tersebut tidak memandang persatuan

ASEAN sebagai hal yang penting. Negara-negara tersebut mementingkan perkembangan pasar ASEAN dapat berlangsung dengan baik. Untuk menghadapi kekuatan-kekuatan besar tersebut, ASEAN memerlukan sentralitas, di mana ASEAN memiliki peran yang sangat penting untuk mendorong rasa saling percaya di antara negara-negara anggotanya. ASEAN dapat memainkan perannya secara lebih efektif dan menjadi pusat penting untuk perkembangan di kawasan Indo-Pasifik.

Upaya untuk mendesain ulang ASEAN perlu untuk dipertimbangkan, terutama dalam memperkuat identitas regional dan meningkatkan program yang dapat menjadi katalis yang demi mengurangi hambatan terhadap arus barang, jasa, modal, manusia, dan informasi di kawasan. Selain itu, ASEAN perlu meningkatkan komitmennya untuk membantu industri-industri yang dapat berkontribusi untuk mencapai emisi nol bersih pada tahun 2060, seperti transisi energi, industri konservasi keanekaragaman hayati, dan restorasi hutan. Terakhir, dalam hal pertukaran orang, ASEAN perlu meningkatkan kerja sama pertukaran pada level pendidikan tinggi berskala besar. Dengan demikian, ASEAN harus memiliki relevansi yang berkesinambungan.

III.C. Memahami Signifikansi Inisiatif Indonesia dalam Mengarusutamakan dan Mengimplementasikan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific

Moch. Faisal Karim, Ph.D.
(Dosen Senior Hubungan Internasional, Universitas Islam Internasional Indonesia)

Sebagai narasumber terakhir, Moch Faisal Karim, Ph.D. memberikan pandangannya secara lebih spesifik untuk melihat signifikansi inisiatif Indonesia dalam konteks implementasi AOIP. Dalam arsitektur regional pasca Perang Dingin dari tahun 1990 sampai

2000, ASEAN didominasi oleh dua tatanan internasional. Tatanan pertama adalah institusi multilateral yang dipimpin oleh ASEAN seperti *ASEAN Regional Forum* dan *East Asia Summit*. Kedua, ada juga yang institusi multilateral yang berbarengan dengan ASEAN-led yaitu mekanisme aliansi bilateral *hub-and-spokes* yang dipimpin AS. Ketika sentralitas ASEAN itu ditantang, yang sebenarnya telah terjadi sejak awal tahun 1990, sudah ada dualisme tatanan internasional yang muncul di kawasan ASEAN dan Asia Timur.

Kemudian, pada tahun 2008 terjadi krisis ekonomi yang mengubah tatanan ekonomi global sehingga memunculkan multilateralisme 2.0 dengan salah satu bentuknya berupa minilateralisme. Dari kecenderungan terhadap multilateralisme 2.0, muncul upaya untuk menciptakan berbagai institusi baru seperti pembentukan *Trans-Pacific Partnership*. Selanjutnya, pada tahun 2013, Tiongkok juga mulai mengintensifkan BRI. Berbagai perkembangan ini memunculkan tantangan dan kontestasi dalam multilateralisme ASEAN.

Selain itu, pembentukan AOIP dapat juga dikontekstualisasikan sebagai sebuah respons terhadap kehadiran Quad, yaitu kerja sama antara AS, Jepang, India, dan Australia. Negara-negara yang tergabung dalam Quad pada awalnya bertemu di tengah rangkaian KTT ASEAN. Kemudian, pasca COVID-19, Quad membuat KTT-nya sendiri di luar mekanisme ASEAN. Kemunculan mekanisme minilateralisme tersebut disebabkan oleh adanya kecenderungan dan ketakutan terhadap berkurangnya kemampuan AS untuk menjalankan pengaruhnya di Asia Tenggara dan Asia Timur. Fenomena ini dapat dipahami melalui lensa teori transisi hegemoni yang memandang seolah-olah kebangkitan Tiongkok akan menciptakan rivalitas. Hal yang paling penting adalah peran dari negara-negara besar dan menengah lainnya, seperti Jepang, India, dan Australia, yang kepentingan strategisnya dekat dengan AS walaupun dengan taraf yang berbeda.

Terdapat beberapa tantangan bagi ASEAN dalam menghadapi situasi di atas. Pertama, upaya *hard balancing* dari AS di Indo-Pasifik menimbulkan ketidakpercayaan dari negara lain terhadap pengaruh normatif dari ASEAN. Kedua, hadirnya opsi keanggotaan dari Quad yang memberikan prospek yang lebih baik bagi lembaga-lembaga ASEAN. Jadi, ASEAN dianggap tidak mampu menyampaikan respon efektif terhadap tantangan keamanan regional. Ketiga, terdapat perbedaan pendapat di dalam ASEAN dalam merespons kehadiran minilateralisme. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tantangan dari Indo-Pasifik memberikan peringatan terhadap adanya proses *hard balancing*, menimbulkan pertanyaan terhadap efektivitas respons ASEAN terhadap tantangan keamanan regional, dan menggarisbawahi ketidaksesuaian strategi di dalam ASEAN untuk menghadapi kompetisi *great powers*.

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan ISEAS - Yusof Ishak Institute, masyarakat ASEAN secara umum memiliki rasa percaya yang cenderung rendah terhadap Tiongkok. Masyarakat ASEAN melihat Tiongkok sebagai kekuatan yang paling berpengaruh. Sebanyak hampir 60% responden melihat Tiongkok sebagai kekuatan ekonomi, namun tidak semua masyarakat ASEAN menganggap Tiongkok sebagai aktor yang paling berpengaruh dalam konteks kekuatan politik dan strategis.

ASEAN sebenarnya ada di tengah irisan antara pengembangan koalisi di Indo-Pasifik yang didorong oleh AS dan Tiongkok, baik dalam aspek ekonomi maupun keamanan. Tetapi, ASEAN cenderung tertinggal dari perkembangan tersebut dan seolah-olah hanya menjadi *talk shop* saja. Oleh karena itu, ASEAN harus berupaya menghidupkan kembali forum-forum seperti *East Asia Summit* (EAS). Pembentukan AOIP berupaya untuk menciptakan sentralitas ASEAN, di mana ASEAN memiliki peran sebagai *driving force* dalam kerja sama dengan pihak eksternal. Namun, terdapat benturan antara multilateralisme di ASEAN, yang berkembang

dengan sangat lambat karena kultur *ASEAN Way* yang memengaruhi respon regional yang lambat, melawan respon utilitarian AUKUS dan Quad di Indo-Pasifik. Quad bukan merupakan kerja sama yang besar, tetapi forum tersebut bersifat sangat utilitarian dan memiliki bidang kerja sama yang sangat spesifik. ASEAN mencoba bersikap utilitarian terkait isu-isu yang riil seperti SDGs, pembangunan, dan maritim. Seberapa jauh AOIP dapat diimplementasikan pun turut memunculkan pertanyaan.

Peran Indonesia sebagai ketua ASEAN dari masa ke masa turut patut diperhatikan. Indonesia menginisiasi lahirnya *Bali Concord I* yang sangat berfokus pada perdamaian melalui TAC. Pada keketuaan selanjutnya, Indonesia melahirkan *Bali Concord II* yang berfokus untuk menciptakan kerangka institusional ASEAN melalui Piagam ASEAN. Kemudian, *Bali Concord III* dibentuk untuk menekankan peran ASEAN sebagai bagian dari masyarakat global, seperti terlibat dalam G20 dan menjadi bagian dari *Global South*.

Pada keketuaan Indonesia di ASEAN tahun 2023, terdapat interaksi antara kepentingan domestik pemerintah Indonesia dalam bidang ekonomi dan keinginan untuk fokus terhadap isu kesejahteraan. Peran Indonesia dalam konteks AOIP sangat fokus pada aspek ekonomi, di mana gagasan yang mendasarinya adalah mempertahankan perdamaian dan pertumbuhan ekonomi. Fokus Indonesia selanjutnya adalah bagaimana AOIP dapat mempertahankan investasi ASEAN selama lima dekade ke depan. Hal ini menunjukkan bahwa kepentingan domestik Indonesia pasca pandemi COVID-19 terletak pada isu ekonomi, sehingga bingkai AOIP dibuat untuk menggarisbawahi kerangka ekonomi ASEAN dibandingkan isu-isu strategis dan keamanan.

Indonesia mencoba untuk mengubah narasi Indo-Pasifik dengan meredam isu-isu strategis dalam konteks rivalitas AS-Tiongkok dan lebih menekankan upaya dalam menciptakan infrastruktur melalui *ASEAN Indo-Pacific Infrastructure Initiative* dan inisiatif

digital. Terdapat pergeseran diskursif dari isu-isu yang sifatnya *high politics* menjadi isu-isu yang menggarisbawahi peluang ekonomi. Contohnya adalah pembentukan IPEF (Indo-Pacific Economic Framework), sebuah inisiatif yang diluncurkan oleh Amerika Serikat pada Mei 2022 dengan tujuan untuk memperkuat kerjasama ekonomi dan mempromosikan pertumbuhan di kawasan Indo-Pasifik dengan fokus pada isu perdagangan dan ekonomi digital, rantai pasokan, energi, pembangunan berkelanjutan, dan lain-lain. Walaupun bukan kerjasama yang bersifat mengikat secara hukum, tetapi setidaknya dengan menggeser isu strategis menjadi isu ekonomi, negara-negara Barat dapat membeli gagasan narasi ekonomi dalam pembahasan AOIP.

Ke depannya, ASEAN harus lebih memperhatikan isu geoekonomi dengan mengelola isu strategis, keamanan, dan ekonomi secara seimbang, mengingat aspek ekonomi dan politik tidak dapat dipisahkan. ASEAN memiliki tiga pilar, yaitu pilar ekonomi, politik, dan sosial-budaya. Dalam pilar ekonomi, semisal terkait isu ketenagakerjaan dan perdagangan, kedua isu tersebut harus menjadi bagian dalam pembahasan isu-isu strategis juga. Selain itu, industri semikonduktor pun merupakan contoh yang relevan, mengingat keterkaitannya dengan rivalitas geopolitik seperti yang ditunjukkan oleh sikap AS. Kerja sama dalam sektor semikonduktor dan mineral tidak bisa hanya dibahas dalam konteks ekonomi semata. Sementara itu, *ASEAN Concord IV* hanya menyangkut satu pernyataan yang berfokus pada aspek geoekonomi, walaupun belum dielaborasi secara lebih lanjut. Ke depan, ASEAN diharapkan akan mengeksplorasi aspek geoekonomi dengan lebih mendalam.

III.D. Diskusi

Merangkum semua penjelasan dari para narasumber, Prof. Dewi melontarkan sebuah pertanyaan mengenai penilaian terhadap keberhasilan keketuaan Indonesia di ASEAN dengan merujuk

pada kesuksesan masa lalu—seperti *Bali Concord I*, *II*, dan *III*—dan membandingkannya dengan capaian *ASEAN Concord IV* tahun 2023 dengan memberikan nilai dari satu hingga sepuluh untuk setiap periode kepemimpinan tersebut.

Moch. Faisal Karim memberikan nilai 9 pada keketuaan Indonesia yang pertama karena menurutnya *Bali Concord I* merupakan langkah yang bermakna karena menciptakan fokus ASEAN dalam menengahi perdamaian di Asia Tenggara atau Asia Timur. Kemudian, *Bali Concord II* dianggap penting karena menghasilkan Piagam ASEAN dan memberikan fokus pada hak asasi manusia, sehingga nilai yang diberikan sebesar 8,5. *Bali Concord III*, meskipun tidak akurat seperti *Concord I* dan *II*, membawa ASEAN ke panggung internasional, terlihat dari partisipasi dalam G20 dan menjadi *observer* di PBB; dengan demikian, nilai yang diberikan adalah 8,5. Terakhir, *ASEAN Concord IV* dinilai menunjukkan bahwa ASEAN kembali ke dasar dengan fokus pada isu ekonomi. Tetapi ASEAN cenderung menggeser fokusnya ke isu-isu teknis yang sebagian besar sudah terlaksana, sehingga nilai yang diberikan adalah 7. Pendapat dari Prof. Djisman adalah penilaian yang diberikan terhadap kesuksesan *ASEAN Concord*, dengan nilai tertinggi untuk *Bali Concord I* dengan nilai 9, diikuti dengan *Bali Concord II* dengan nilai 8,5, dan nilai terendah diberikan untuk situasi saat ini yaitu dengan nilai 6.5, yang dipengaruhi dengan adanya tekanan dari negara-negara luar ASEAN, terutama Tiongkok dan Korea. Terakhir, rata-rata penilaian tim peneliti THC terhadap kinerja Indonesia saat memegang keketuaan ASEAN tahun 2023 di bawah 6.

Pertanyaan 1

- Apakah ada perubahan signifikan dalam dinamika regional ASEAN, terutama dalam aspek ekonomi dan politik keamanan?

Jawaban 1

Moch. Faisal Karim, Ph.D.

- Penilaian terhadap implementasi AOIP dianggap kurang maksimal, terutama dengan belum optimalnya upaya Indonesia. Upaya Indonesia, seperti pembuatan kerjasama di bawah mekanisme AOIP, dianggap masih terbatas dan lebih berfokus pada hal-hal yang tidak memiliki dampak besar terhadap ASEAN. Selain itu, adanya tantangan kebijakan dari AS—khususnya *Inflation Reduction Act*, yang mencoba untuk mengarahkan rantai pasok ke arah hegemoni AS—akan berdampak pada hubungan ekonomi dengan Indonesia. Pemahaman tentang isu geoekonomi penting untuk melihat bagaimana kebijakan ekonomi AS dan Tiongkok akan diarahkan oleh kepentingan geopolitik. Selain itu, perlu juga untuk menyorot masih kurangnya perhatian terhadap aspek keamanan dan pertahanan dalam konteks implementasi AOIP, yang belum menjadi fokus utama bagi Indonesia.

Marina Ika Sari, M.Si (Han)

- Implementasi AOIP dinilai belum maksimal, mengingat minimnya program-program konkret di lapangan, terutama setelah hanya ada satu forum yang diadakan, yaitu AIPF. Proses pengembangan makalah konsep untuk pengimplentasian AOIP dalam konteks pertahanan dan keamanan masih dalam tahap penggodokan. Hasil dari pengembangan dan realisasi dari makalah konsep tersebut ke dalam bentuk rencana aksi akan menjadi penting untuk diantisipasi.

Pertanyaan 2

- Bagaimana cara ASEAN dapat membuat dampak program atau program kerjanya lebih dirasakan oleh masyarakat, khususnya penduduk Indonesia dengan fokus pada pembangunan stabilitas politik dan kemajuan sosial ekonomi?
- Apakah model seperti ‘Future of Europe’ yang diadopsi oleh Uni Eropa merupakan solusi yang dapat diterapkan oleh ASEAN?
- Bagaimana ASEAN dapat menciptakan mekanisme partisipasi langsung masyarakat tanpa mengorbankan kedaulatan negara-negara anggotanya?

Jawaban 2

Prof. Djisman Simanjuntak

- ASEAN harus menjadi lebih dekat dan dirasakan oleh rakyat, tanpa harus menjadi seperti Uni Eropa. Dorongan dari prakarsa-prakarsa ASEAN diharapkan dapat memberikan tambahan untuk kemajuan ekonomi masing-masing negara anggota. Hal ini menunjukkan pentingnya upaya untuk menciptakan lapangan kerja bagi semua kalangan masyarakat, terutama dengan adanya perubahan teknologi yang akan turut mengubah lanskap pekerjaan. ASEAN diharapkan dapat menjadi kekuatan pendorong tambahan untuk memenuhi kebutuhan kualifikasi baru yang diperlukan oleh pekerjaan baru yang muncul. Akan sulit untuk membayangkan ASEAN memiliki parlemen dengan hak *budgeter* seperti di Eropa, mengingat struktur dan fungsi parlemen ASEAN yang saat ini lebih merupakan forum antar parlemen daripada parlemen yang sebenarnya.

Marina Ika Sari, M.Si (Han)

- Program-program yang dimiliki oleh ASEAN diharapkan dapat memberikan manfaat secara langsung bagi masyarakat, dengan fokus pada kepemudaan, seperti program pertukaran pemuda. Program *ASEAN Rising Leaders* yang diadakan oleh The Habibie Center dapat menjadi contoh. Dengan demikian, ASEAN dapat menggarisbawahi pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia masyarakat ASEAN melalui program-program atau kegiatan yang relevan untuk meningkatkan daya saing di pasar kerja dan kompetisi global.

Pertanyaan lanjutan dari moderator

- Sejauh mana kemajuan ASEAN dalam menjalani *mutual recognition agreement* untuk sertifikasi profesi, yang memungkinkan tenaga kerja yang sudah bersertifikasi dapat bekerja di negara-negara ASEAN lainnya?

Jawaban

Prof. Djisman Simanjuntak

- Persetujuan tersebut sedang berjalan, walaupun dalam skala yang relatif kecil, terutama di Indonesia. Salah satu kelemahannya adalah proporsi pendidikan sains, teknologi, teknik, dan matematika (*science, technology, engineering, and mathematics* atau STEM) yang kecil dibandingkan dengan total pendidikan di Indonesia. Bidang-bidang dengan sifat teknis cenderung lebih mudah untuk memiliki perjanjian pengakuan internasional karena lebih mudah untuk diukur dan terstandarisasi daripada bidang lainnya, seperti ekonomi.

Pertanyaan 3

- Bagaimana posisi Indonesia, khususnya sebagai ketua ASEAN, dalam menghadapi tantangan global, seperti dalam menjaga dan meningkatkan perekonomian pasca pandemi COVID-19, mengingat rivalitas geopolitik Tiongkok dan AS serta ketegangan di berbagai belahan dunia seperti perang antara Rusia-Ukraina serta konflik Israel-Palestina?

Jawaban 3

Prof. Djisman Simanjuntak

- Indonesia rentan terhadap situasi geopolitik yang penuh ancaman, di mana setiap gangguan dianggap merugikan. Kebutuhan akan tatanan internasional yang stabil dan transparan menjadi penting bagi pelaku bisnis dan ekonomi. Selain itu, Indonesia turut berpotensi menerima dampak negatif dari rivalitas antara AS dan Tiongkok, terutama terkait Undang-Undang Chips and Science yang disahkan di AS pada 2022 dan potensi balasan dari Tiongkok serta dampaknya terhadap industri semikonduktor. Teknologi semikonduktor memiliki posisi penting dalam kehidupan sehari-hari dan Indonesia perlu mengakuisisi teknologi baru dan menciptakan tatanan ekonomi internasional yang stabil, walaupun pendekatan multilateralisme sulit untuk dilakukan saat ini. Ide-ide kerjasama *ad hoc* yang tidak melibatkan masalah kedaulatan akan menjadi langkah realistis dalam menjaga stabilitas ekonomi.

Pertanyaan 4

- Singapura mempunyai kepentingan terhadap stabilitas geopolitik dan geoekonomi di negara-negara anggota ASEAN. Bagaimana bentuk strategi dan kebijakan Singapura terhadap persaingan kepentingan geopolitik dan geoekonomi antara AS dan Tiongkok di ASEAN?

Jawaban 4

Prof. Djisman Simanjuntak

- Singapura menganggap bahwa satu-satunya tatanan global yang dapat diterima adalah yang terbuka, dan mereka tidak mungkin memihak di antara Tiongkok dan AS dari segi ekonomi. Konsep globalitas adalah keharusan bagi Singapura, sementara perang ekonomi di antara Tiongkok dan AS dianggap merugikan bagi negara-negara seperti Singapura. Konflik semikonduktor antara AS dan Tiongkok dianggap akan diselesaikan pada akhirnya karena kedua belah pihak membutuhkan rantai pasok global yang berfungsi dengan baik. Terkait Indo-Pasifik, desainnya saat ini dianggap tidak kredibel, dan kebijakan AS dalam hal ini masih tidak jelas, terutama jika kekuasaan dipegang oleh Trump yang kemungkinan besar akan mengabaikan inisiatif seperti TPP. Sebagai hasilnya, pelaku bisnis dan ekonomi akan cenderung menunggu dan melihat dalam skema yang melibatkan AS.

Pertanyaan 5

- Apakah ASEAN memiliki visi yang realistis untuk mengembangkan mekanisme yang mampu melindungi dari proteksionisme teknologi yang meningkat dan resiko

tertinggal dalam perkembangan teknologi kritis, mengingat negara-negara ASEAN cenderung belum memiliki kapasitas dalam teknologi kritis yang berkembang?

- Bagaimana ancaman proteksionisme teknologi yang meningkat dapat mempengaruhi pertukaran teknologi di antara negara-negara anggota ASEAN, terutama mengingat bahwa beberapa negara anggota memiliki kapasitas teknologi yang lebih besar daripada yang lain?

Jawaban 5

Prof. Djisman Simanjuntak

- Meskipun teknologi terbaru menarik perhatian, penting untuk memperhatikan bahwa dalam konteks ekonomi, tidak semua teknologi terbaru bersifat kritis. Undang-Undang Chips and Science menyoroti pentingnya hubungan kompetisi dan kerjasama teknologi global. Kesulitan dalam mempromosikan program STEM di Indonesia, khususnya di universitas swasta, menandakan perlunya campur tangan pemerintah untuk dapat mendukung STEM secara lebih agresif. Selain itu, universitas negeri terkemuka di Indonesia dapat menjadi pusat unggulan dalam pendidikan dan penelitian STEM serta dalam mengonversi ilmu pengetahuan menjadi sebuah bisnis. Perbandingan dengan negara tetangga menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kelemahan dalam pendidikan STEM. Indonesia disarakann untuk melakukan investasi besar-besaran baik dari modal asing maupun realokasi APBN untuk memperkuat kapasitas STEM.

Pertanyaan 6

- Apa langkah-langkah konkret yang perlu ASEAN ambil untuk tetap relevan dalam menghadapi berbagai tantangan global, termasuk pada proses mendesain ulang organisasi, tanggung jawab negara-negara anggota, investasi yang diperlukan? Apakah realistis untuk mengharapkan ASEAN untuk dapat menanggapi tantangan dalam kondisi saat ini?

Jawaban 6

Prof. Djisman Simanjuntak

- Terdapat tiga hal penting yang perlu diperhatikan dalam konteks ASEAN, yaitu peningkatan sumber daya ASEAN, perubahan dalam struktur pengambilan keputusan dari prinsip “satu negara satu suara” menjadi *weighted voting*, dan upaya untuk menggalang kerjasama industri, terutama dengan transisi energi dan ketahanan pangan. Di antara prakasa baru, terdapat penekanan pada konektivitas di antara negara-negara ASEAN dalam hal barang, jasa, investasi, manusia, dan informasi. Prakarsa ini dapat meningkatkan kerjasama di dalam ASEAN.

Marina Ika Sari, M.Si (Han)

- Terdapat ekspektasi tinggi terhadap Indonesia saat memegang keketuaan ASEAN, terutama dalam mengatasi isu-isu keamanan regional seperti krisis Myanmar dan Laut Cina Selatan. Meskipun Indonesia mengadopsi pendekatan *quiet diplomacy*, dampaknya terhadap penyelesaian krisis Myanmar masih terbatas, karena Myanmar masih belum mengimplementasikan kesepakatan 5PCs. Dalam diskusi ASEAN, absennya pembahasan tentang peta baru Cina di

LCS menunjukkan sikap hati-hati ASEAN dalam berhadapan dengan Tiongkok. Terdapat pula kritik terhadap fokus kebijakan Indonesia yang cenderung lebih mengedepankan kepentingan ekonomi daripada isu-isu strategis.

Pertanyaan 7

- Bagaimana komentar dari Prof. Djisman terkait upaya lain yang dilakukan oleh ASEAN selain dua kasus tersebut (konflik Laut Cina Selatan dan krisis Myanmar), termasuk upaya untuk membuat proses pengambilan keputusan ASEAN lebih responsif dan meningkatkan kapasitas organisasi?

Jawaban 7

Prof. Djisman Simanjuntak

- Sesuai dengan peribahasa *“the taste of the pudding is in the eating,”* banyak persetujuan yang ditandatangani dalam konteks ASEAN seringkali sulit untuk dilaksanakan, seperti proyek *Epicentrum* yang tidak bisa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dalam situasi saat ini, meskipun mungkin dapat terjadi dalam waktu sepuluh tahun ke depan jika kemampuan teknologi meningkat. Kesulitan dalam melaksanakan persetujuan bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di semua organisasi yang terkait dengan ASEAN yang sudah menjadi sebuah kebiasaan lama.

Moch. Faisal Karim, Ph.D.

- Terdapat tiga aspek yang menjadi perhatian, yaitu *ASEAN Matters*, pertumbuhan ekonomi, dan AIOP. Dalam hal tersebut, terdapat pertimbangan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak mencapai harapan yang diinginkan, sementara

ASEAN menunjukkan adanya kemauan untuk menghadirkan fleksibilitas di bawah upaya untuk mencapai komponen *ASEAN Matters*. Pengaturan yang lebih dalam terhadap *ASEAN Way* dalam pengambilan keputusan di ASEAN menjadi penting untuk membuat upaya dan prosedur yang dibuat ASEAN lebih bermakna, sehingga dapat memperkuat institusionalisasi ASEAN.

Pertanyaan 8

- Di mana keberadaan ASEAN dan relevansinya dalam konteks pertumbuhan ekonomi, serta apakah ASEAN masih memiliki peran yang signifikan atau tidak?
- Bagaimana pentingnya teknologi dan pendidikan tinggi dalam menghadapi tantangan global, terutama mengingat kurangnya lembaga pendidikan tinggi yang fokus pada pengetahuan teknologi di Indonesia dan ASEAN?
- Apakah Indonesia harus bertanggung jawab atas inisiatif ini karena populasi besar mereka? Apakah kekuatan lebih terletak pada aspek ekonomi atau populasi?

Jawaban 8

Prof. Dr. Djisman S. Simandjuntak

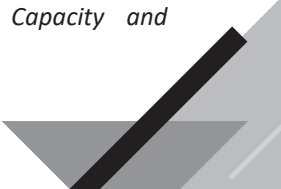
- ASEAN memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas dan kesejahteraan regional dengan komponen *ASEAN Matters*. Tanpa keberhasilan ASEAN, negara-negara di kawasan dapat mengalami ketidakstabilan. Selain itu, fokus pada pendidikan STEM diperlukan untuk mendukung perkembangan industri dan pendidikan tinggi di Indonesia. Tiongkok, yang pada tahun 80an-90an telah berhasil menggerakkan industri dan pendidikan tinggi dengan mengirim mahasiswa ke luar negeri, dapat menjadi model bagi Indonesia. Pemerintah Indonesia dapat memperluas program beasiswa seperti LPDP dan mengarahkan lebih banyak mahasiswa ke bidang STEM demi mengembangkan industri-industri tersebut di Indonesia, baik oleh investor asing maupun lokal.

Epilog

Terdapat berbagai poin positif dari kepemimpinan Indonesia di ASEAN pada tahun 2023. Keberhasilan ini ditunjukkan melalui dua pencapaian utama, sesuai dengan hasil diskusi yang dikembangkan melalui rangkaian seminar kolaborasi KIS-AIPI dan THC.

Pertama, Indonesia berhasil menunjukkan kesadaran dan kemampuan untuk menghadirkan respons yang relevan dan praktis terhadap berbagai isu yang dihadapi secara riil oleh masyarakat ASEAN, terutama pada tingkat akar rumput. Hal ini tampak kentara dalam diskusi melalui seminar kedua dan ketiga, terutama dalam berbagai pembahasan mengenai pencapaian Indonesia di bawah pilar ekonomi. Dalam hal ini, agenda Indonesia untuk menjadikan ASEAN sebagai “episentrum pertumbuhan” diejawantahkan melalui 16 prioritas di bidang ekonomi. Salah satu inisiatif yang digarispawahi adalah percepatan negosiasi DEFA yang ditujukan untuk mendukung proses digitalisasi di kawasan. Selain itu, luntarnya konteks keamanan dan geopolitik dari AOIP pun menunjukkan prioritas ASEAN, terutama Indonesia, dalam mengedepankan keuntungan ekonomi di tengah kompetisi geopolitik di Indo-Pasifik. Secara keseluruhan, relevansi dari berbagai kesepakatan ASEAN merefleksikan kemampuan Indonesia dalam menjembatani kepentingan domestik dengan prioritas keketuaan Indonesia.

Kedua, keketuaan Indonesia pun diiringi dengan upaya untuk mendorong perubahan secara perlahan terhadap kerangka institusional ASEAN. Selama keketuaan Indonesia, *ASEAN High-Level Task Force on ASEAN Community's Post-2025 Vision* mengerahkan fokus yang signifikan dalam mendiskusikan agenda mengenai “*Strengthening ASEAN Institutional Capacity and*



Effectiveness” yang ditujukan untuk memperkuat kapasitas dan efektivitas institusional ASEAN dalam mewujudkan Visi Komunitas ASEAN pasca tahun 2025. Diskusi dalam seminar pertama menggarisbawahi kritik yang ditujukan terhadap keterbatasan kerangka institusional ASEAN dalam menghadapi berbagai krisis dan tantangan di kawasan. Dalam menanggapi kritik tersebut, seminar ketiga menunjukkan bahwa keketuaan Indonesia dapat ditutup dengan hadirnya berbagai perubahan terhadap kerangka institusional ASEAN, seperti perubahan terhadap penamaan lingkungan Sekretariat ASEAN menjadi Markas Besar ASEAN (ASEAN *Headquarter*) dan upaya penguatan mekanisme pembuatan keputusan di bawah KTT ASEAN.

Harapan besar dari masyarakat internasional tertuju pada Indonesia sebagai Ketua ASEAN 2023 untuk melahirkan terobosan baru dalam menangani masalah-masalah internal di kawasan. Namun, perubahan terhadap kerangka institusional ASEAN tidak serta merta menghadirkan solusi terhadap krisis kemanusiaan dan sengketa teritorial yang hadir di ASEAN selama Indonesia mendapuk posisi ketua. Performa Indonesia sebagai Ketua ASEAN tahun 2023 dinilai tidak memenuhi ekspektasi masyarakat internasional jika dibandingkan dengan rekam jejak keketuaan Indonesia di masa lalu. Pada keketuaan Indonesia sebelum-sebelumnya, Indonesia menginisiasi dokumen-dokumen kunci seperti *Bali Concord I, II*, dan *III* yang memiliki nilai strategis bagi perkembangan institusional ASEAN. Berkaca pada serangkaian dokumen *Bali Concord*, terjadi penurunan ambisi integrasi regional dalam ASEAN dengan hadirnya *ASEAN Concord IV*. Tema politik regionalisme telah bergeser dari solidaritas, komunitas, dan sentralitas menjadi persatuan dan ketahanan. Hal ini menunjukkan kecenderungan perubahan yang bertahap dibandingkan perubahan signifikan di dalam organisasi regional tersebut.

Dua isu utama yang masih menjadi tantangan di kawasan ASEAN adalah sengketa Laut Cina Selatan dan Krisis Myanmar. Walaupun Indonesia telah berupaya untuk mempercepat negosiasi CoC dan menginisiasi pembentukan *guidelines*, pekerjaan rumah lainnya adalah memastikan bahwa CoC dan panduan tersebut dapat efektif dan dipatuhi semua pihak yang berkepentingan di Laut Cina Selatan. Terkait dengan kompleksitas isu Myanmar, setahun keketuaan Indonesia di ASEAN tidak mampu menyelesaikan krisis tersebut karena masih belum ada hasil yang signifikan dari implementasi 5PCs. Indonesia hanya mampu melakukan upaya-upaya yang dapat menjadi fondasi untuk keberlanjutan langkah ketua ASEAN selanjutnya. Salah satu yang perlu diperhatikan dalam penyelesaian Krisis Myanmar ini adalah bagaimana usaha ASEAN dapat menjadi satu usaha yang berkelanjutan, tidak berubah-ubah berdasarkan Ketekuaan ASEAN.

Selama menjabat sebagai Ketua ASEAN 2023, terdapat interaksi antara keinginan domestik pemerintah Indonesia dalam bidang ekonomi dan keinginan untuk fokus terhadap isu kesejahteraan dibandingkan dengan isu-isu geopolitik. Hal ini terlihat dalam konteks AOIP yang berfokus pada aspek ekonomi melalui penyelenggaraan AIPF dengan tujuan untuk memajukan kerangka ekonomi ASEAN, bukan isu-isu strategis dan keamanan. Sehingga penilaian terhadap implementasi AOIP yang dilakukan Indonesia dianggap belum optimal.

Profil Penulis

I

Kajian Prioritas Keketuaan Indonesia di ASEAN dalam Bidang Politik dan Keamanan

Moderator: Prof. Dr. Mayling Oey Gardiner



Prof. Dr. Mayling Oey Gardiner merupakan profesor emeritus di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia (FEB UI) dan Ketua Komisi Ilmu Sosial, Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) sejak 2018. Sebagai seorang profesor emeritus, beliau merupakan profesor perempuan pertama pada 2001 di FEB UI. Prof. Dr. Mayling mendapatkan gelar master dalam bidang sosiologi (dari College of William and Mary, Amerika Serikat) dan *Population Science* (dari Harvard School of Public Health, Amerika Serikat) serta gelar Ph.D. dalam bidang demografi dari Australian National University yang diraih pada tahun 1982. Prof. Dr. Mayling memiliki pengalaman lebih dari 40 tahun pada bidang demografi sosial, baik mengajar maupun melakukan riset pada isu-isu gender, pendidikan, perempuan serta dunia kerja.

Sambutan: Prof. Dr. Satryo Sumantri Brodjonegoro



Prof. Satryo Soemantri Brodjonegoro merupakan Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia pada periode 2018-2023. Ia memperoleh gelar Ph.D. di bidang teknik mesin dari University of California, Amerika Serikat, dan kemudian bergabung dengan Institut Teknologi Bandung (ITB). Sebagai ilmuwan, Prof. Satryo telah

mengeluarkan lebih dari 99 publikasi karya tulis ilmiah. Beliau juga pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi pada periode 1999 hingga 2007. Saat ini Prof. Satryo aktif sebagai dosen tamu di bidang teknis mesin di Toyohashi University of Technology, Jepang, dan ITB.

Sambutan: Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro



Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro menjabat sebagai Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Sebelumnya, Duta Besar Sidharto merupakan Duta Besar Republik Indonesia untuk India pada 2017 hingga 2021. Duta Besar Sidharto menamatkan pendidikannya pada tingkatan

Sarjana di Universitas Katolik Parahyangan dan pendidikan paska sarjana di Naval Postgraduate School di Monterey, California.

Pembicara I: Prof. Dr. Dewi Fortuna Anwar



Prof. Dr. Dewi Fortuna Anwar merupakan Profesor Riset di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Ketua Dewan Pengurus The Habibie Center, dan Anggota dari Komisi Ilmu Sosial dalam Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI). Prof. Anwar pernah menjadi Asisten dari Menteri Sekretaris Negara

bidang Politik dan Globalisasi di bawah administrasi Presiden B.J. Habibie dan Deputy Bidang Politik Sekretariat Wakil Presiden di bawah kepemimpinan Wakil Presiden Budiono dan Jusuf Kalla. Prof. Anwar menyelesaikan pendidikan doctoral di Department of Politics and History, Monash University, Australia. Ia pun sebelumnya menempuh pendidikan magisternya dalam Studi Asia Tenggara dan sarjana dengan spesialisasi sejarah Asia Tenggara di School of Oriental and African Studies (SOAS), University of London.

Pembicara II: Prof. Hikmahanto Juwana



Prof. Hikmahanto Juwana merupakan seorang Guru Besar di Fakultas Hukum, Universitas Indonesia (FH UI) sejak tahun 2001, sebelum diangkat sebagai dekan di fakultas tersebut pada tahun 2004. Sebelumnya, beliau bekerja sebagai staf ahli untuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Kwik Kian Gie di awal

2000an. Saat ini, beliau menjabat sebagai Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani sejak tahun 2020. Setelah Prof. Hikmahanto menamatkan pendidikan Sarjana di Fakultas Hukum Universitas

Indonesia, beliau mendapat gelar magister hukum internasional dari Universitas Keio, Jepang, pada 1989 dan gelar doktor pada tahun 1997 dari Universitas Nottingham, Inggris Raya.

Pembicara III: Yuyun Wahyuningrum, M.A



Yuyun merupakan Direktur Eksekutif ASEAN Parliamentarians for Human Rights (APHR) sejak mengakhiri masa baktinya sebagai perwakilan Indonesia dalam ASEAN untuk Komisi Antarpemerintah Hak Asasi Manusia (AICHR) selama dua periode hingga tahun 2024. Beliau memperoleh gelar sarjana dari Universitas Indonesia di tahun 1995 dan

gelar magister di bidang hak asasi manusia dari Universitas Mahidol, Thailand, di tahun 2007. Hingga kini, Yuyun merupakan Kandidat Ph.D. di International Institute for Social Studies (ISS) di Universitas Erasmus di Den Haag, Belanda. Sebelumnya, beliau bekerja sebagai Ketua Tim Fasilitas Instrumen Dialog Regional UE-ASEAN tentang Hak Asasi Manusia (READI HRF) dimana beliau banyak bekerja dengan ASEAN Commission on the Promotion and the Protection of the Rights of Women and Children (ACWC), dan ASEAN Committee on Women (ACW).

Penutup: Dr. Mohammad Hasan Ansori



Mohammad Hasan Ansori, Ph.D., adalah Direktur Eksekutif The Habibie Center, sebuah lembaga think tank terkemuka yang fokus pada isu-isu demokrasi, hak asasi manusia, dan pembangunan di Indonesia. Ia meraih gelar doktor di bidang Sosiologi dari

The University of Hawai'i at Manoa pada tahun 2011, dengan disertasi yang menyoroti kajian konflik dan perdamaian, khususnya dalam konteks sosial-politik di Indonesia. Dr. Ansori juga merupakan pengajar tetap di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.

II

Epicentrum of Growth: Menuju ASEAN yang Inklusif dan Terintegrasi di Bawah Keketuaan Indonesia

Moderator: Prof. Dr. Dewi Fortuna Anwar



Prof. Dr. Dewi Fortuna Anwar merupakan Profesor Riset di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Ketua Dewan Pengurus The Habibie Center, dan Anggota dari Komisi Ilmu Sosial dalam Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI). Prof. Anwar pernah menjadi Asisten dari Menteri Sekretaris Negara

bidang Politik dan Globalisasi di bawah administrasi Presiden B.J. Habibie dan Deputy Bidang Politik Sekretariat Wakil Presiden di bawah kepemimpinan Wakil Presiden Budiono dan Jusuf Kalla. Prof. Anwar menyelesaikan pendidikan doctoral di Department of Politics and History, Monash University, Australia. Ia pun sebelumnya menempuh pendidikan magisternya dalam Studi Asia Tenggara dan sarjana dengan spesialisasi sejarah Asia Tenggara di School of Oriental and African Studies (SOAS), University of London.

Sambutan: Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo



Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo adalah seorang Guru Besar Hukum Pidana di Universitas Indonesia dan saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI). Beliau menyelesaikan pendidikan sarjananya di Fakultas Hukum, Universitas Indonesia pada tahun 1979, sebelum melanjutkan studi untuk meraih gelar magister di universitas yang sama. Prof. Harkristuti kemudian menempuh pendidikan doktoral (Ph.D.) di Sam Houston State University, Huntsville, Texas, Amerika Serikat.

Pembicara I: Netty Muharni



Netty Muharni saat ini menjabat sebagai Asisten Deputi Menteri untuk Kerja Sama Ekonomi Regional dan Sub-Regional di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Beliau bertanggung jawab mengkoordinasikan dan memperkuat kerja sama ekonomi antara Indonesia dan negara-negara tetangga di kawasan regional serta sub-regional, guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Beliau meraih gelar Master di bidang Perencanaan Perkotaan dan Regional dari Curtin University of Technology, Western Australia.

Pembicara II: Zamroni Salim, Ph.D.



Zamroni Salim, Ph.D., adalah Direktur Pusat Riset Makroekonomi dan Keuangan (MAFIN) di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Beliau menyelesaikan pendidikan doktoralnya di Graduate School of International Development (GSID), Nagoya University, Jepang, pada tahun 2009.

Dr. Zamroni memiliki keahlian dalam bidang makroekonomi, keuangan, dan pembangunan internasional, yang telah diterapkan dalam berbagai penelitian dan kebijakan di Indonesia.

Pembicara III: Fithra Faisal Hastiadi Ph.D.



Fithra Faisal Hastiadi Ph.D. adalah Direktur Eksekutif Next Policy, sebuah lembaga riset kebijakan yang fokus pada isu-isu ekonomi dan pembangunan di Indonesia. Dr. Fithra memperoleh gelar Ph.D. dari Graduate School of Asia-Pacific Studies di Waseda University, Jepang, pada periode 2009

hingga Maret 2013. Beliau memiliki ketertarikan di berbagai isu ekonomi seperti ekonomi moneter, perdagangan internasional, ekonomi pembangunan, ekonomi politik, dan inovasi disruptif.

Penutup: Prof. Dr. Mayling Oey-Gardiner



Prof. Dr. Mayling Oey Gardiner merupakan profesor emeritus di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia (FEB UI) dan Ketua Komisi Ilmu Sosial, Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) sejak 2018. Sebagai seorang profesor emeritus, beliau merupakan profesor perempuan pertama pada 2001 di FEB UI. Prof. Dr. Mayling mendapatkan gelar master dalam bidang sosiologi (dari College of William and Mary, Amerika Serikat) dan *Population Science* (dari Harvard School of Public Health, Amerika Serikat) serta gelar Ph.D. dalam bidang demografi dari Australian National University yang diraih pada tahun 1982. Prof. Dr. Mayling memiliki pengalaman lebih dari 40 tahun pada bidang demografi sosial, baik mengajar maupun melakukan riset pada isu-isu gender, pendidikan, perempuan serta dunia kerja.

Penutup: Dr. Mohamad Hasan Ansori



Mohammad Hasan Ansori, Ph.D., adalah Direktur Eksekutif The Habibie Center, sebuah lembaga think tank terkemuka yang fokus pada isu-isu demokrasi, hak asasi manusia, dan pembangunan di Indonesia. Ia meraih gelar doktor di bidang Sosiologi dari The University of Hawai'i at Manoa pada tahun 2011, dengan disertasi yang menyoroti kajian konflik dan perdamaian, khususnya dalam konteks sosial-politik di Indonesia. Dr. Ansori juga merupakan pengajar tetap di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.

III

ASEAN Concord IV: Meninjau Tonggak Capaian Keketuaan Indonesia di ASEAN

Sambutan: Prof. Dr. Mayling Oey-Gardiner



Prof. Dr. Mayling Oey Gardiner merupakan profesor emeritus di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia (FEB UI) dan Ketua Komisi Ilmu Sosial, Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) sejak 2018. Sebagai seorang profesor emeritus, beliau merupakan profesor perempuan pertama pada 2001 di FEB UI. Prof. Dr. Mayling mendapatkan gelar master dalam bidang sosiologi (dari College of William and Mary, Amerika Serikat) dan *Population Science* (dari Harvard School of Public Health, Amerika Serikat) serta gelar Ph.D. dalam bidang demografi dari Australian National University yang diraih pada tahun 1982. Prof. Dr. Mayling memiliki pengalaman lebih dari 40 tahun pada bidang demografi sosial, baik mengajar maupun melakukan riset pada isu-isu gender, pendidikan, perempuan serta dunia kerja.

Moderator: Prof. Dr. Dewi Fortuna Anwar



Prof. Dr. Dewi Fortuna Anwar merupakan Profesor Riset di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Ketua Dewan Pengurus The Habibie Center, dan Anggota dari Komisi Ilmu Sosial dalam Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI). Prof. Anwar pernah menjadi Asisten dari Menteri Sekretaris Negara bidang Politik dan

Globalisasi di bawah administrasi Presiden B.J. Habibie dan Deputy Bidang Politik Sekretariat Wakil Presiden di bawah kepemimpinan Wakil Presiden Budiono dan Jusuf Kalla. Prof. Anwar menyelesaikan pendidikan doktoral di Department of Politics and History, Monash University, Australia. Ia pun sebelumnya menempuh pendidikan magisternya dalam Studi Asia Tenggara dan sarjana dengan spesialisasi sejarah Asia Tenggara di School of Oriental and African Studies (SOAS), University of London.

Pembicara I: Prof. Dr. Djisman S. Simandjuntak



Prof. Dr. Djisman S. Simandjuntak merupakan Rektor Universitas Prasetiya Mulya. Selain itu, ia pun saat ini menjabat sebagai Ketua Board of Management dari Centre for Strategic International Studies (CSIS), Presiden Komisaris PT Indoritel Makmur Internasional Tbk., dan Presiden Komisaris PT Indo Tambangraya Megah Tbk.

Sebelumnya, ia pernah mengepalai Departemen Ekonomi dan Dewan Pembina CSIS. Prof. Simandjuntak menempuh pendidikan doktoral dalam Ekonomi Internasional dan magister dalam Ekonomi Moneter dan Keuangan Publik di University of Cologne, Jerman.

Pembicara II: Moch. Faisal Karim, Ph.D.



Moch. Faisal Karim, Ph.D. merupakan dosen senior di Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII). Ia menempuh pendidikan doktoral dalam Studi Politik dan Internasional di University of Warwick dan mendapatkan gelar magister dalam Keamanan Internasional di

University of Nottingham. Dr. Karim saat ini merupakan anggota *fellow* dari Indo-Pacific Circle yang bernaung di bawah Council for Strategic and Defense Research (CSDR) and the Centre for Policy Research (CPR), India. Penelitiannya berfokus pada neksus di antara politik domestik dan isu transnasional di Asia Tenggara. Ia telah menerbitkan sebuah buku berjudul *Indonesia's Regional and Global Engagement Role Theory and State Transformation in Foreign Policy*.

Pembicara III: Marina Ika Sari, M.Si (Han)



Marina Ika Sari, M.Si (Han) merupakan peneliti di bawah Program Studi ASEAN, The Habibie Center. Sebelum bergabung dengan The Habibie Center pada tahun 2019, ia menempuh pendidikan magister di program studi Diplomasi Pertahanan dari Universitas Pertahanan dan sarjana Hubungan Internasional dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Marina menerima Beasiswa Kementerian Luar Negeri Taiwan 2023 dan menjadi Peneliti Tamu di Taiwan Center for Security Studies, National Chengchi University. Sebelumnya, ia bekerja di Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA). Marina memiliki pengalaman yang ekstensif dalam riset mengenai keamanan, diplomasi pertahanan, dan ASEAN.

Penutup: Dr. Mohamad Hasan Ansori



Mohammad Hasan Ansori, Ph.D., adalah Direktur Eksekutif The Habibie Center, sebuah lembaga think tank terkemuka yang fokus pada isu-isu demokrasi, hak asasi manusia, dan pembangunan di Indonesia. Ia meraih gelar doktor di bidang Sosiologi dari The University of Hawai'i at Manoa pada tahun 2011, dengan disertasi yang menyoroti kajian konflik dan perdamaian, khususnya dalam konteks sosial-politik di Indonesia. Dr. Ansori juga merupakan pengajar tetap di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.

**Keketuaan Indonesia di ASEAN 2023:
Mendefinisikan Relevansi ASEAN
dalam Aspek Politik-Keamanan dan Ekonomi**

ISBN 978-623-81837-8-8



9

786238

081722